


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

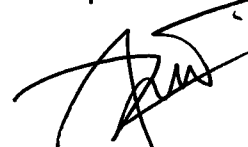
Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2014.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2014 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Itjen Kabag Perencanaan Kasubag : <i>Endang W. Purnama</i>	

Jakarta, Februari 2015  
Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM  
NIP. 19570426 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

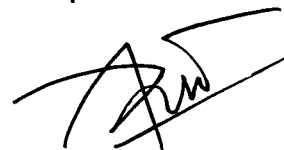
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2014 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2014.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2014 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2015  
Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidayat, MM  
NIP. 19570426 198503 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
BAB II ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN .....	3
A. Organisasi .....	3
B. Kepegawaian .....	6
BAB III KERAGAAN ANGGARAN .....	9
A. Perkembangan Realisasi Anggaran .....	9
B. Capaian Kinerja .....	11
BAB IV KERAGAAN KEGIATAN .....	13
1. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018) .....	13
2. Pengawasan.....	14
3. Evaluasi Kegiatan Strategis .....	15
4. Audit Kinerja .....	18
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2013 .....	22
6. Evaluasi Kinerja LHA lingkup Eselon I .....	25
7. Gerakan WTP .....	26
8. Reviu RKA-KL 2014.....	28
9. Audit Investigasi .....	28
10. Audit Tujuan Tertentu .....	30
11. Audit Sanggah Banding .....	31
12. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	31

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
LAPORAN TAHUN 2014

13. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi .....	34
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat .....	38
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	39
BAB VI PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 .....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 .....	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Deptan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 .....	5
Gambar 4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	6
Gambar 5. Data Komposisi Fungsional Auditor .....	6
Gambar 6. Data Komposisi Fungsional Tertentu .....	7
Gambar 7a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Gambar 7b. Data Pegawai Berdasarkan Rincian Pegawai.....	8
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	9
Gambar 9. Tren Capaian Unit Kerja dengan Predikat SPI Cukup Handal.....	34

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 .....	10
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 .....	10
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014.....	12
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi Strategis .....	15
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2014 .....	19
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2014 .....	19
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2010 s.d. 2014 .....	20
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014 .....	20
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan ItjenTahun 2010 s.d. 2014 .....	21
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2010 s.d. 2014 .....	21
Tabel 11. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 – 2014 .....	22
Tabel 12. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2013 .....	23
Tabel 13. Simpulan Kelemahan dan Rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2013 .....	24
Tabel 14. Hasil Penilaian LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2009 s.d. 2013 ..	25
Tabel 15. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2014 .....	27
Tabel 16. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Tahun 2014 .....	29
Tabel 17. Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu Tahun 2014 .....	30
Tabel 18. Keragaan Audit Sanggah Banding Tahun 2014 .....	31
Tabel 19. Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan 2010 s.d. 2014 .....	33
Tabel 20. Keragaan Hasil Penilaian Unit Kerja WBK Tahun 2014 .....	37
Tabel 21. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2014 .....	40

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian. Didukung pula dengan strategi pengawasan *GREEN AUDITS* peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP mampu membawa perubahan positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan laporan tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2014. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.



## **BAB II**

# **ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**

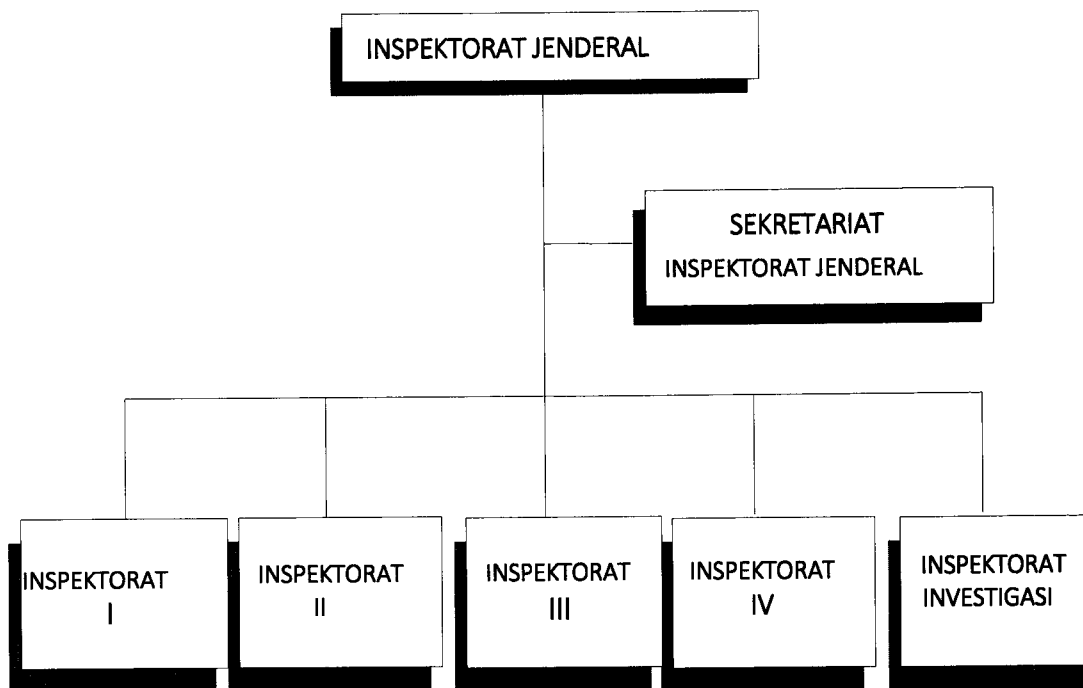
### **A. ORGANISASI**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

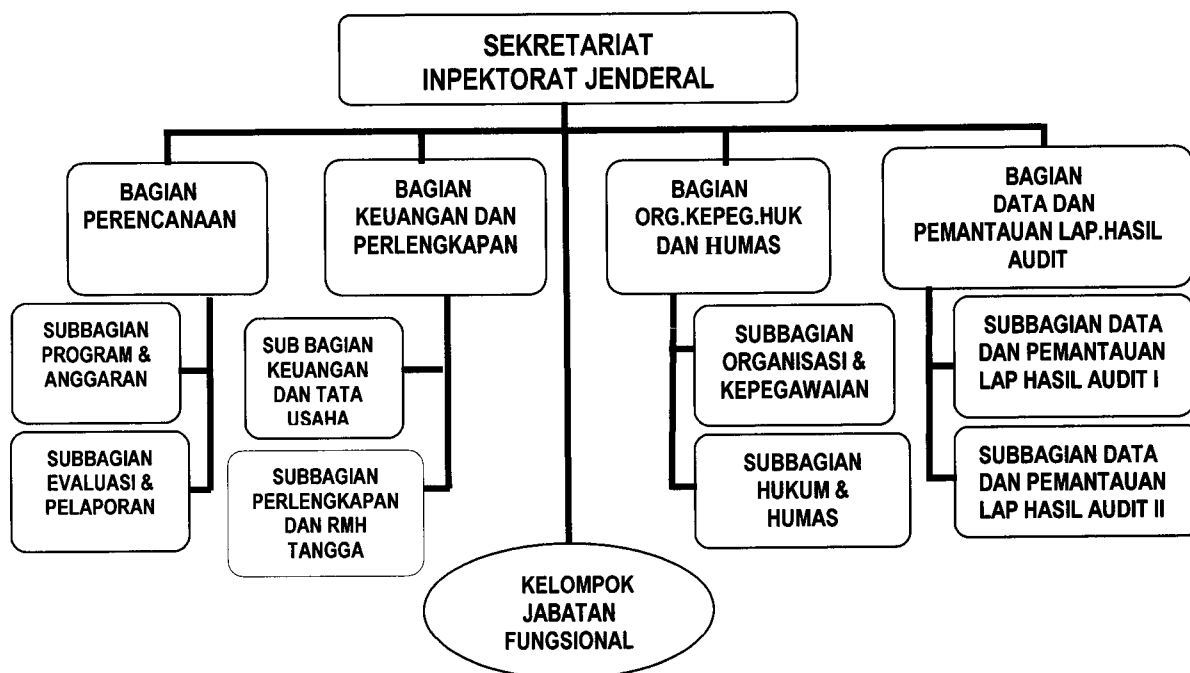
Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010**

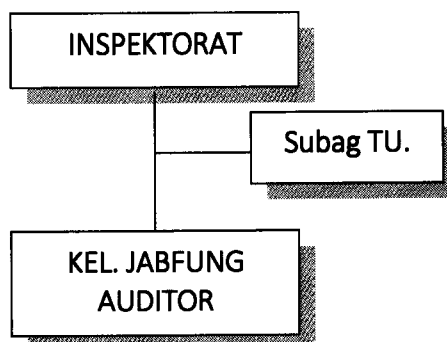


Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut :

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010.**



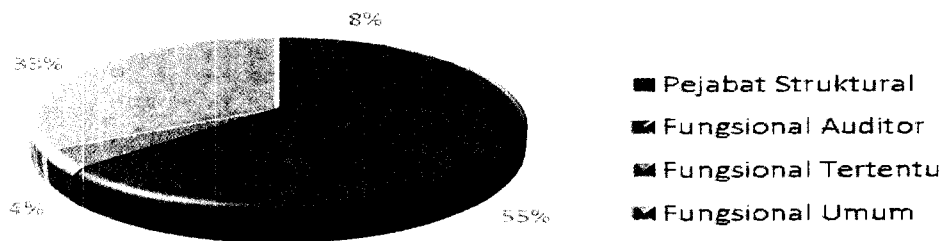
**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Deptan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010.**



## B. KEPEGAWAIAN

Gambar 4.

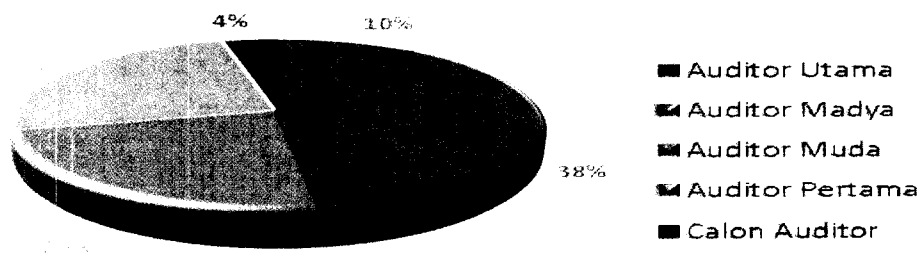
### DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 285 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 157 orang (55%) fungsional Auditor, 11 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 93 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.

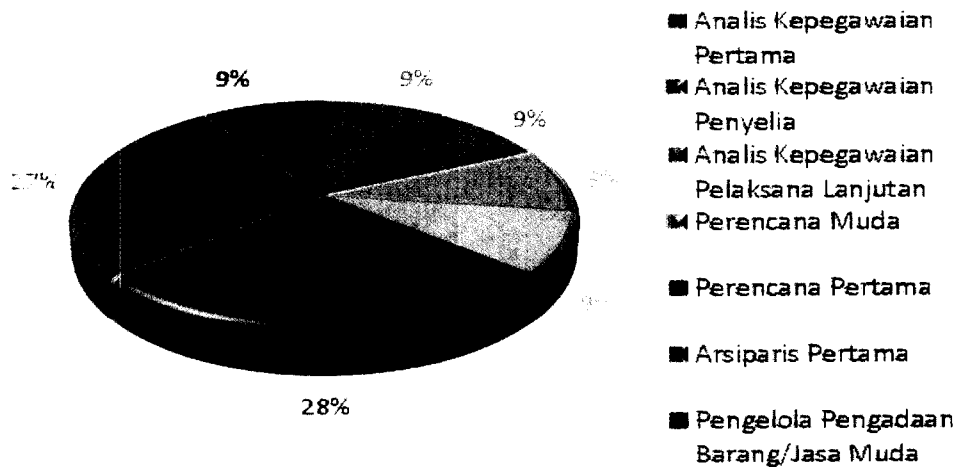
### DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL AUDITOR



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 157 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 59 orang (38%) Auditor Madya, 37 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 6 orang (4%) Calon Auditor.

Gambar 6.

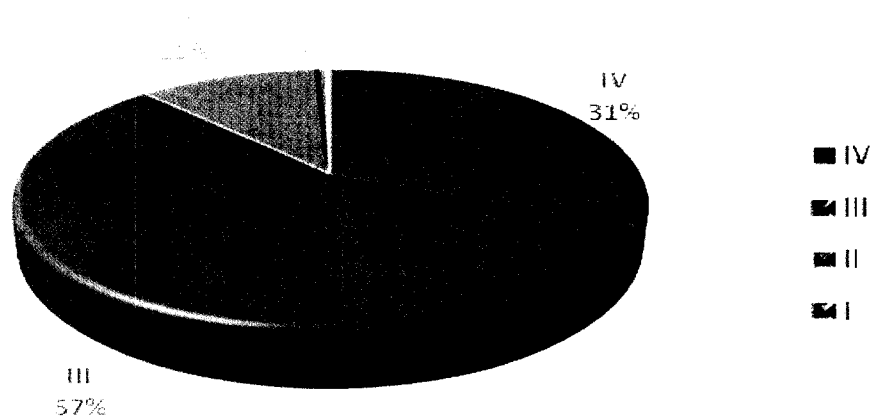
### DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL TERTENTU



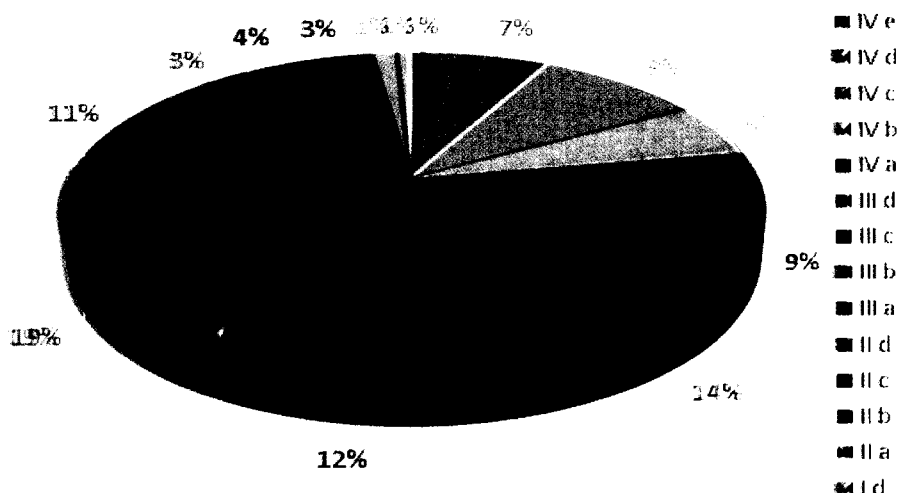
Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencanaan Muda, 3 orang (28%) Perencanaan Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.

Gambar 7a.  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

### DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



7b.  
Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan



Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 89 orang (31%) golongan IV, 162 orang (57%) golongan III, 32 orang (11%) golongan II, dan 2 orang (1%) golongan I.

Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 2 orang (1%) golongan IV e, 20 orang (7%) golongan IV/d, 26 orang (9%) golongan IV/c, 16 orang (6%) golongan IV/b, 25 orang (9%) golongan IV/a, 41 orang (14%) golongan III/d, 35 orang (12%) golongan III/c, 53 orang (19%) golongan III/b, 33 orang (11%) golongan III/a, 8 orang (3%) golongan II/d, 12 orang (4%) golongan II/c, 8 orang (3%) golongan II/b, 4 orang (1%) golongan II/a, dan 2 orang (1%) golongan I/d.

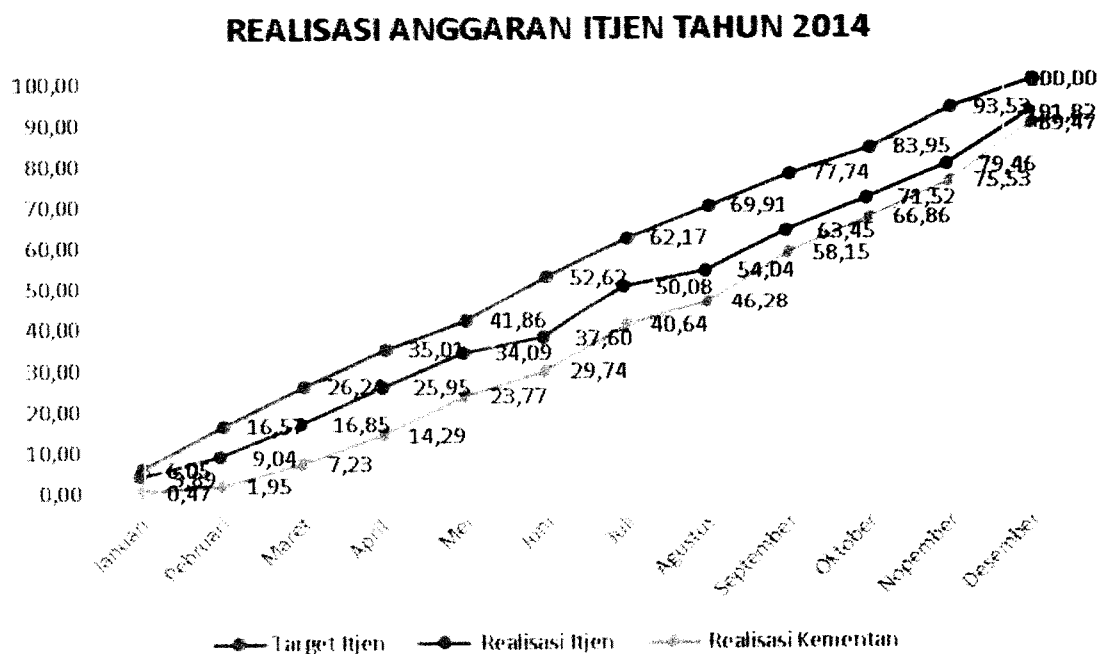
## BAB III

# KERAGAAN ANGGARAN

### A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2014, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan 4 Sukses Pembangunan Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Perlu diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi anggaran adalah sebesar Rp60.170.175.443 atau 91,82% dari total anggaran sebesar Rp65.528.157.000.

Gambar 8.  
Perkembangan Realisasi Anggaran per Bulan



**Tabel 1.**

**Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014**

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Januari	3.964.703.067	2.548.083.605	3,89
Pebruari	6.890.063.391	3.373.649.776	5,15
Maret	6.337.145.060	5.120.764.911	7,81
April	5.748.638.887	5.964.995.201	9,10
Mei	4.487.034.720	5.328.276.176	8,13
Juni	7.054.524.723	2.303.007.978	3,51
Juli	6.259.379.553	8.176.840.381	12,48
Agustus	5.066.825.721	2.593.246.935	3,96
September	5.131.687.723	6.170.341.269	9,42
Oktober	4.071.673.558	5.289.094.463	8,07
Nopember	6.277.296.795	5.199.285.334	7,93
Desember	4.239.183.809	8.102.589.421	12,37
<b>JUMLAH</b>	<b>65.528.157.000</b>	<b>60.170.175.443</b>	<b>91,82</b>

Tren perkembangan realisasi anggaran tahun 2014 terlihat tabel di atas dengan realisasi terbesar adalah pada bulan Juli 2014 yaitu sebesar Rp8.176.840.381 atau 12,48% dari target serapan Rp6.259.379.553 dan realisasi terkecil adalah pada bulan Juni 2014 yaitu sebesar Rp2.303.007.978 atau 3,51% dari target Rp7.054.524.723,-

Apabila dibandingkan dengan laju serapan tingkat Kementerian Pertanian sebagaimana tergambar dalam gambar 8. Inspektorat Jenderal mampu merealisasikan anggaran diatas laju serapan tingkat Kementerian Pertanian.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2014 sebesar Rp65.528.157.000,- seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.**

**Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014**

Kode	Jenis Belanja	PAGU DIPA (Rp juta)	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja pegawai	20.179	18.087	89.63	2.092	10.37
52	Belanja barang	44.648	41.432	92.80	3.038	6.81
53	Belanja modal	700	650	92.97	49	7.03
<b>Jumlah belanja</b>		<b>65.528</b>	<b>60.170</b>	<b>91.82</b>	<b>5.179</b>	<b>8.18</b>



## B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 101,86%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp60.170.175.450,- atau 91,82%.

Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut : 1). Audit Kinerja Pusat dan Daerah terhadap 427 satker (102,64%); 2). Audit Investigasi sebanyak 27 kasus (112,5%); 3). Evaluasi kegiatan strategis sebanyak 4 laporan (100%); 5). Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi di lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 1 laporan (100%); 6) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP sebanyak 2 laporan (100%); 7) Evaluasi LAKIP 12 Eselon I sebanyak 13 laporan (100%); 8). Reviu Laporan Keuangan sebanyak 26 laporan (100%); dan 9) Audit BMN dalam rangka mendukung Gerakan WTP sebanyak 4 laporan (100%). Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada tabel berikut:

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
LAPORAN TAHUN 2014

**Tabel. 3**  
Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2014

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
			Rp.	Rp.	%					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	66.628.167.000	60.170.176.460	91,82					101,86
I	1755 s.d 1756	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Inspektorat I s.d IV</b>								
	002	Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian	1.348.000.000	1.188.209.352	88,15	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100,00
	004	Audit Kinerja Pusat dan Daerah	15.494.600.000	15.161.211.935	97,85	416 satker	427 satker	427 satker	427 satker	102,64
	005	Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	1.336.000.000	1.155.438.980	86,48	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,00
	006	Evaluasi Kegiatan Strategis	1.212.000.000	1.108.076.052	91,43	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
	009	Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat I s.d IV	1.790.900.000	1.718.450.412	95,95	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
II	1759	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi</b>								
	002	Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti korupsi	2.636.700.000	2.397.430.954	90,93	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	003	Audit Sanggah banding	200.800.000	107.191.500	53,38	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40,00
	004	Audit Khusus/Investigasi	1.057.200.000	917.982.265	86,83	24 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	27 Kasus	112,50
	005	Audit dengan Tujuan Tertentu	1.250.000.000	1.177.565.173	94,21	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	200,00
	008	Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi	57.100.000	50.510.000	88,46	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00
III	1760	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal</b>								
	001	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan pengawasan	402.800.000	222.528.827	55,25	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00
	002	Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas, data dan pemantauan LHA serta laporan progres	3.663.500.000	3.104.164.281	84,73	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00
	003	Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas serta data dan pemantauan LHA	4.363.600.000	4.264.118.385	97,72	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	004	Laporan pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementan	5.759.500.000	5.304.225.449	92,10	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00
	005	Dokumen analisis LHA	403.200.000	214.974.300	53,32	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00
	006	Diklat fungsional dan teknis bidang pengawasan	408.700.000	257.806.000	63,08	2 Diklat	2 Diklat	2 Diklat	2 Diklat	100,00
	010	Sarana dan Prasarana Perkantoran	563.325.000	519.504.480	92,22	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00
	994	Layanan Perkantoran	23.443.557.000	21.169.521.605	90,30	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	136.675.000	131.265.500	96,04	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit	100,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>66.628.167.000</b>	<b>60.170.176.460</b>	<b>91,82</b>					<b>101,86</b>

## **BAB IV**

# **KERAGAAAN KEGIATAN**

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai tahun 2010 setiap kementerian/lembaga harus menrestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan, meningkatkan ketersediaan anggaran melalui kerjasama dengan instansi lingkup Kementan maupun instansi lain, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan mendorong berfungsinya pengawasan melekat (waskat) atasan terhadap bawahan pada setiap unit kerja, serta memfungsikan LAKIP sesuai dengan Inpres No.7 tahun 1999.

### **A. PROGRAM PENGAWASAN**

Sesuai dengan Perpres No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, program kerja Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan mengacu kepada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun capaian kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

#### **1. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018).**

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas. Metodologi reviu laporan keuangan kementerian keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Tahun 2013 telah melaksanakan dua kali reviu atas Laporan Keuangan (LK) UAPA/B Kementerian Pertanian pada Bagian Anggaran 018 (BA.018). Reviu pertama dilakukan atas Laporan Keuangan Semester I

Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 25 Juli 2014 terhadap 12 Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah satker sebanyak 1.440 satker dari total anggaran sebesar Rp15.470.610.980.000,00.

Keberhasilan yang telah dicapai pada Semester I Tahun 2014, yaitu dari 1.440 satker, 1.373 satker (95,34%) telah mengirimkan laporan keuangan dan telah dikonsolidasi di laporan keuangan kementerian, dan 67 satker (1,72%) belum mengirimkan laporan tersebut. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Semester I tahun 2014 berdasarkan data dari Eselon I sebanyak 1.373 satker (95,34%).

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

- a. Hasil rekonsiliasi antara Sistem Akutansi Umum (SAU) Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian Pertanian masih terdapat perbedaan data.
- b. Terdapat perbedaan data antara Neraca SAK dan Neraca LBPS Semester I tahun 2014 atas akun Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap lainnya.
- c. Persediaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) belum dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

## **2. Pengawasan**

Pengawasan terhadap Persiapan Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) TA. 2014 untuk penyediaan bibit kegiatan Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi program pengembangan tebu tahun 2014 yang dilaksanakan dengan tim Ditjen Perkebunan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 18 Juli 2014, berdasarkan pengawasan pihak satker telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang terkait dengan penetapan tim teknis provinsi/kabupaten dan penetapan CP/CL penerima bansos pembangunan KBD.

Yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan KBD terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pada Provinsi Jawa Tengah, target pembangunan KBD telah dilakukan rasionalisasi karena adanya kebijakan penghematan keuangan negara, namun hal tersebut belum dirinci berapa kebutuhan bongkar ratoon dan ekstensifikasi.
- b. Pada Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Subang bahwa pembangunan pembibitan tidak akan dihentikan/dilanjutkan karena pengolahan dianggap terlambat, sedangkan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon kegiatannya dihentikan atau tidak

dilanjutkan karena akan direvisi menjadi pengadaan benih untuk kegiatan ekstensifikasi.

- c. Pada Provinsi DIY di 3 Kabupaten dari hasil pengecekan lapangan tanaman kurang terawat dan belum dilakukan penyiangan dan pemupukan karena pada kelompok tani belum tersedia dana yang cukup dan di lain pihak dana bansos ke rekening kelompok belum dilaksanakan.

### 3. Evaluasi Kegiatan Strategis

Tujuan Evaluasi Kegiatan Strategis Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Keragaan kegiatan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 4.**  
**Keragaan Kegiatan Evaluasi Strategis**

No	Kegiatan Evaluasi Strategis	Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	15 s.d. 24 Desember 2014	IR I
2	Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		IR II
3	Penyediaan Benih Sumber Kedelai TA 2014		IR III
4	Evaluasi Terhadap Pengembangan Ternak Pemanfaatan Dana Direktif Presiden ( <i>On Top</i> )	30 Mei s.d. 5 Juni 2014	IR IV

#### a. Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Secara umum dapat diinformasikan bahwa kegiatan evaluasi program/kegiatan Penyuluhan Pertanian telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 24 Desember 2014 di sepuluh Provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Lampung, Sumsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sulbar, NTB, dan Bali. Namun, sampai dengan saat penyusunan laporan, seluruh laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan di Inspektorat I.

#### b. Evaluasi Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan.

Evaluasi Strategis terhadap Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dilakukan khususnya untuk komoditas padi, dengan alasan bahwa perbenihan padi telah cukup berkembang hingga ke tingkat petani, dibandingkan jagung yang lebih didominasi jenis hibrida dan perbenihan kedelai yang relatif kurang berkembang.

Kegiatan evaluasi program/kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 24 Desember 2014 di tujuh Provinsi yaitu Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, dan NTB. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan perbanyakan benih benih penjenis (BS), benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR) dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014. Institusi pelaksana perbanyakan benih yang dievaluasi antara lain : Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) khususnya Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), Balai Benih Induk (BBI) Padi, PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri, serta kelompok penangkar.

Selain itu terkait kebijakan perbenihan, evaluasi juga dilakukan pada Ditjen Tanaman Pangan (Direktorat Perbenihan), Badan Litbang Pertanian u.p. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang TP) Bogor dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor, Badan Benih Nasional (BBN), dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi maupun Kabupaten, BPSBTPH, serta Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi sebagai berikut:

- 1) Lokasi evaluasi di 7 provinsi, merupakan sentra padi di Indonesia dan selama 3 tahun terakhir memberikan kontribusi antara 65,77%-65,86% dari produksi padi nasional. Produksi tersebut berasal dari rata-rata luas panen yang mencapai 8.370.350 ha/tahun dan produktivitas 52,57 ku/ha (103,44%) dari produktivitas nasional sebesar 50,82 ku/ha. Tingginya produksi padi di atas diyakini karena kontribusi dari benih yang merupakan agroinput penting dalam produksi padi, meskipun penggunaan benih berlabel tidak serta merta mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan jika tidak diikuti dengan penggunaan input lainnya secara seimbang.
- 2) Kebutuhan benih pada musim hujan (MH) lebih tinggi dibandingkan pada musim kemarau (MK), yaitu kebutuhan benih rata-rata pada MH rata-rata sebanyak 127.945 ton dibandingkan pada MK rata-rata sebanyak 87.432 ton.
- 3) Kelompok penangkar yang semestinya hanya memperbanyak BP-BR, malah memperbanyak benih BS-BD dan BD-BP, serta kecenderungan petani memilih benih label ungu (BP) dibandingkan dengan benih label biru (BR), bahkan mulai mengarah ke label putih (BD).

- 4) Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, UPTD BBI, UPBS-BPTP, BUMN (PT Sang Hyang Seri dan PT. Pertani), dan kelompok tani/kelompok penangkar lainnya., ternyata memproduksi semua kelas benih meliputi BD, BP, dan BR. Bahkan UPBS pada BPTP Provinsi Jawa Barat, yang tidak tercatat di BPSB Jawa Barat sebagai produsen benih sebar (BR), pada kenyataannya sejak tahun 2012 menghasilkan benih sebar (BR/berlabel biru). Dengan kondisi tersebut terlihat bahwa alur perbenihan (*flow of seed*) yang diatur oleh Ditjen Tanaman Pangan pada saat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena semua pihak telah memperbanyak benih semua kelas tanpa memperhatikan peran dan fungsinya masing-masing.
- 5) Benih padi yang digunakan masih didominasi 4 varietas lama meliputi Ciherang, Mekongga, IR 64, dan Situbagendit, yang menunjukkan bahwa varietas unggul baru (VUB) belum cukup diminati oleh petani, baik karena VUB-VUB tersebut kurang disosialisasikan, maupun karena belum mempunyai sifat-sifat yang melebihi keunggulan 4 varietas dominan tersebut.
- 6) Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi sebagai penghasil benih kelas BS, yaitu penyaluran benih sumber tidak sepenuhnya tepat waktu sesuai kebutuhan tanam, tidak semua varietas yang dibutuhkan oleh pengguna dapat disediakan oleh BB Padi, dan pembelian benih kelas BS kurang selektif.

**c. Evaluasi Penyediaan Benih Sumber Kedelai TA. 2014.**

Salah satu upaya untuk mendukung swasembada kedelai 2014 yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian yaitu menyediakan benih bermutu dari varietas unggul spesifik lokasi melalui UPBS BPTP. Berdasarkan analisa data kebutuhan benih sebar kedelai tahun 2014 di Indonesia menurut Badan Litbang Pertanian yaitu sebesar 80.900 ton dengan target luas lahan mencapai 1.618.000 Ha (50 kg/ha). Sedangkan untuk luas areal pengembangan kedelai melalui UPBS BPTP untuk benih sebar (ES) dilaksanakan pada 14 provinsi yaitu Provinsi NAD, Sumut, Jambi, Sumbar, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sulsel, Kalsel dan Sultra, dengan target tanam hanya seluas 1.254.740 Ha dan benih kelas ES sebanyak 62.737 ton. Untuk memenuhi kebutuhan benih kelas ES dibutuhkan benih kelas SS sebanyak 3.136,85 ton, benih FS 174,27 ton dan BS 10,89 ton.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian Swasembada Kedelai Tahun 2014, yaitu:

- 1) Kurangnya ketersediaan lahan sehingga diperlukan tambahan luas lahan sekitar 1.014.016 Ha.
- 2) Rata-rata produktivitas kedelai nasional relatif rendah 1,4 ton/Ha hal ini disebabkan rendahnya penerapan teknologi budidaya.
- 3) Tidak adanya jaminan harga jual beli tingkat petani.
- 4) Benih sumber mutu tidak tersedia.

**d. Evaluasi Terhadap Pengembangan Ternak Pemanfaatan Dana Direktif Presiden (*On Top*).**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya telah melakukan evaluasi kegiatan Strategis yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2014 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi NTT, Papua Barat dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pengembangan sapi potong melalui *Ranch* peternakan di Provinsi NTT dan Papua Barat serta pengembangan peternakan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan di Jawa Timur melalui bantuan langsung dari Presiden (Dana Direktif Presiden) dengan anggaran senilai Rp568.149.489.000,00.

**4. Audit Kinerja**

Audit Kinerja merupakan pemeriksaan yang bersifat operasional yang dilakukan sesuai jadwal dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilakukan untuk menilai kinerja dari satuan kerja (satker) dan unit kerja melalui indikator efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PKPT tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah melakukan audit kinerja terhadap 427 satker (102,64%) dari target 416 satker dengan jumlah total anggaran yang diperiksa sebesar Rp15.161.211.935 atau 97,85% dibandingkan dengan anggaran Kementan Rp15.494.600.000. Kegiatan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2014 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap. Berikut disajikan data keragaan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:



**Tabel 5.**  
**Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2014**

<b>Tahap</b>	<b>Jumlah Satker</b>	<b>Anggaran yang diaudit (Rp)</b>
I	64	933.480.276.000
II	66	1.406.764.667.000
III	72	1.143.338.919.000
IV	68	851.052.068.000
V	74	1.721.828.135.000
VI	67	1.385.600.882.000
Pemeriksaan Pusat	16	4.383.944.823.000
<b>JUMLAH</b>	<b>427</b>	<b>11.826.009.770.000</b>

Realisasi Audit kinerja pada Tahun 2013 sebanyak 427 obyek audit (satker) atau 102,64% dari target sebanyak 416 satker atau 29,65% dari total satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 1.440 satker.

Capaian kinerja tersebut di atas didukung atas capaian kinerja masing-masing Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kontribusi masing-masing Inspektorat dalam menjalankan Audit Kinerja tergambar dalam tabel 6 sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2014**

<b>Inspektorat</b>	<b>Jumlah Satker</b>	<b>Anggaran Tahun 2014 yang diaudit (Rp)</b>
I	112	2.297.734.180.000
II	105	3.832.093.012.000
III	105	3.321.283.527.000
IV	105	2.374.899.051.000
<b>Jumlah</b>	<b>427</b>	<b>11.826.009.770.000</b>

Dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada 12 eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2014 telah diterbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) sebanyak 426 LHP dari realisasi audit kinerja sebanyak 427 satker. LHA yang diterbitkan di tahun 2014 baru mencapai 99,76% dari target LHA yang diterbitkan sebanyak 427 LHA.

Sejak tahun anggaran sebelum 2009 sampai dengan 2014 jumlah kerugian negara yang diinventarisir sejumlah Rp157.523.013.161,00. Dari jumlah temuan kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp134.364.480.054,00 atau

85,30% sehingga masih terdapat sisa kerugian negara sebesar Rp23.158.533.107,00 atau 14,70%.

**Tabel 7.**  
**Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2010 s.d. 2014**

Tahun	Kerugian Negara	Ditindaklanjuti		Sisa	
		Rp.	%	Rp.	%
sd. 2010	71.732.307.146,75	67.247.546.595,63	93,75	4.484.760.551,12	6,25
2011	8.491.387.857,22	7.959.777.037,22	93,74	531.610.820,00	6,26
2012	12.902.654.719,26	11.898.727.629,26	92,22	1.003.927.090,00	7,78
2013	34.648.432.464,51	21.509.634.586,68	62,08	13.138.797.877,83	37,92
2014	38.525.786.112,71	31.678.742.340,38	82,23	6.847.043.772,33	17,77
<b>Total</b>	<b>166.300.568.300,45</b>	<b>140.294.428.189,17</b>	<b>84,36</b>	<b>26.006.140.111,28</b>	<b>15,64</b>

Data persebaran kerugian negara per unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8.**  
**Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014**

Eselon I	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Ditindaklanjuti (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	7.810.278.116,28	6.400.723.395,18	81,95
Ditjen Tanaman Pangan	38.154.446.505,22	26.511.875.308,31	69,49
Ditjen Hortikultura	5.434.199.146,75	5.026.257.148,14	92,49
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	21.307.265.873,00	18.811.826.137,33	88,29
Ditjen Perkebunan	35.183.290.372,90	30.390.851.446,85	86,38
Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	12.398.939.435,47	11.005.167.886,52	88,76
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	4.303.991.213,28	4.101.455.705,76	95,29
Badan Litbang Pertanian	17.322.967.628,12	16.510.174.684,34	95,31
Badan PPSDM Pertanian	13.867.362.483,39	11.157.896.382,70	80,46
Badan Ketahanan Pangan	628.899.963,50	530.922.563,50	84,42
Badan Karantina Pertanian	9.888.927.562,54	9.847.277.530,54	99,58
<b>Jumlah</b>	<b>166.300.568.300,45</b>	<b>140.294.428.189,17</b>	<b>84,36</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu 38.154.446.505,22 atau 69,49% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada

Badan Ketahanan Pangan yaitu sebesar Rp628.899.963,50 atau 84,42% dari seluruh temuan kerugian negara.

Secara umum, upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut atas kerugian negara telah diupayakan dengan maksimal, akan tetapi tahun 2014 nilai presentasi kerugian negara menunjukkan angka peningkatan dibanding dengan nilai temuan kerugian negara tahun 2013, sedangkan untuk nilai ketidakefektifan dan ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9.**

**Diskripsi Besaran Anggaran Kementerian Pertanian Yang diaudit serta Nilai Temuan  
Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2010 s.d. 2014**

Tahun	Anggaran yang diaudit (Rp)	Temuan					
		Tidak Efektif (Rp)	%	Tidak Efisien (Rp)	%	Kerugian Negara (Tidak Ekonomis) (Rp)	%
2010	5.414.162.556.000	64.587.270.817	1,19	8.080.837.484	0,15	6.277.311.305	0,12
2011	5.957.355.344.000	98.903.528.157	1,66	12.722.124.611	0,21	8.491.387.857	0,14
2012	12.004.816.949.000	295.578.182.159	2,46	16.214.885.825	0,14	12.902.654.719	0,11
2013	13.618.208.022.000	138.203.209.439	1,01	24.197.486.563	0,18	34.648.432.464	0,25
2014	11.826.009.770.000	70.531.733.297	0,60	1.862.155.486	0,02	34.634.950.381	0,29
Jumlah	48.820.552.641.000,00	667.803.923.869,02	6,93	63.077.489.968,90	0,69	96.954.736.726,00	0,91
Rata-rata	9.764.110.528.200	133.560.784.774	1,39	12.615.497.994	0,14	19.390.947.345	0,18

Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, diketahui bahwa tren capaian rata-rata efektifitas, efisien dan keekonomisan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,14% dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan pengawasan perlu menjadi prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan, seperti tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 10.**

**Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode 2010 - 2014**

Tahun	Jumlah Satker yang diaudit	Anggaran yang diaudit (Rp)	% rata-rata Efektifitas, Efisiensi, Keekonomisan	Tren
2010	405	5.414.162.556.000	98,54	-
2011	452	5.957.355.344.000	97,98	-0,51
2012	458	12.004.816.949.000	97,30	-0,68
2013	458	13.618.208.022.000	98,55	1,25
2014	427	11.826.009.770.000	99,09	0,54

Bila dianalisis lebih mendalam, selisih pengurangan jumlah anggaran yang diaudit tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebesar Rp1.792.198.252.000, merupakan jumlah anggaran yang cukup besar dan berpotensi mengurangi laju tren peningkatan persentase keekonomisan atau meningkatnya nilai ketidakekonomisan yang menjadi indikator sasaran strategis Itjen, sebagaimana terlihat dari data fluktuasi Nilai Kerugian Negara sebagaimana data pada tabel 11 sebagai berikut:

**Tabel 11.**  
**Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai KN (Rp.)</b>	<b>% KN terhadap anggaran yang diaudit</b>	<b>Tren</b>
2010	6.277.311.305,51	0,12	
2011	8.491.387.857,22	0,13	0,03
2012	12.902.654.719,26	0,11	-0,03
2013	34.648.432.464,51	0,19	0,14
2014	34.634.950.381,48	0,29	-0,03

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui adanya laju peningkatan tingkat persentase nilai kerugian negara pada Kementan sebesar 0,03%. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pelaksanaan program/kegiatan yang belum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, Sistem Pengendalian Intern yang lemah dan proses pengadaan barang/jasa yang mengalami keterlambatan, serta adanya revisi kegiatan di pertengahan/akhir tahun anggaran yang berpotensi terjadi kegagalan.

Namun Inspektorat Jenderal selalu berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dengan penerapan kebijakan pengawasan intern "GREEN AUDITS". Inspektorat Jenderal harus mampu berperan sebagai katalis agar memberikan dampak positif terhadap kinerja dan ketaatan aparatur dalam mengelola anggaran, terutama yang bekerja pada satker - satker lingkup Kementan yang diaudit.

#### **5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2013**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP-135/M.PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi AKIP, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, dan (5) Capaian Kinerja; ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian disajikan pada tabel 12 sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Hasil Evaluasi AKIP eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2013**

<b>Eselon I</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>
Sekretariat Jenderal	81.21	Sangat baik
Inspektorat Jenderal	82.53	Sangat baik
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	73.97	Baik
Direktorat Jenderal Hortikultura	78.30	Sangat baik
Direktorat Jenderal Perkebunan	79.68	Sangat baik
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	77.90	Sangat baik
Direktorat Jenderal (PPHP)	75.69	Baik
Direktorat Jenderal PSP	71.65	Baik
Badan Litbang Pertanian	82.76	Sangat baik
Badan PPSDMP	72.68	Baik
Badan Ketahanan Pangan	77.31	Sangat baik
Badan Karantina Pertanian	82.47	Sangat baik
<b>Total</b>	<b>78.01</b>	<b>Sangat baik</b>

Nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013 adalah sebesar 78,01 dengan kategori Sangat Baik, atau terjadi peningkatan sebesar 3,16 jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012, yang rata-rata sebesar 74,85 dengan kategori Baik.

Tiga peringkat terbaik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penilaian kategori sangat baik diraih oleh 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan nilai 82,76; 2) Inspektorat Jenderal dengan nilai 82,53; dan 3) Badan Karantina Pertanian dengan nilai 82,47.

Dari hasil evaluasi AKIP tingkat kementerian oleh Kementerian PAN dan RB, beberapa kesimpulan kelemahan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.**  
**Simpulan Kelemahan dan Rekomendasi Kementerian PAN dan RB**  
**Terhadap AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2013**

Komponen	Kelemahan	Rekomendasi
Pengukuran Kinerja	Kualitas rumusan indikator kinerja di tingkat unit kerja belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, selain itu pada unit kerja belum dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran.	Memanfaatkan indikator kinerja utama pada unit kerja dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
Pelaporan Kinerja	LAKIP, terutama di tingkat unit kerja, belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan data kinerja.	Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LAKIP unit kerja, khususnya informasi evaluasi dalam bentuk analisis pencapaian sasaran strategis dan perbandingan data kinerja.  Memanfaatkan informasi LAKIP ditingkat unit kerja untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja.
	LAKIP, terutama di tingkat unit kerja, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan organisasi dan meningkatkan kinerja.	
Evaluasi Kinerja	Hasil evaluasi kinerja pada unit kinerja dilingkungan Kementerian Pertanian yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	Unit – unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk perbaikan perencanaan kinerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja.  Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Kementerian Pertanian

		untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
--	--	---

Peningkatan nilai LAKIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian berkomitmen kuat untuk selalu memberikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana terdiskripsi pada tabel di bawah ini:

**Tabel 14.**  
**Hasil Penilaian LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2009 s.d. 2013**

NO.	ASPEK YANG DIEVALUASI	Nilai Tahun 2009	Nilai Tahun 2010	Nilai Tahun 2011	Nilai Tahun 2012	Nilai Tahun 2013
1	Perencanaan Kinerja (25%)	21,16	21,40	24,66	25,87	25,90
2	Pengukuran Kinerja (20%)	3,88	12,75	14,13	14,42	14,46
3	Pelaporan Kinerja (15%)	7,26	6,88	9,88	10,75	11,16
4	Evaluasi Kinerja (10%)	5,60	5,42	5,69	5,85	6,83
5	Capaian Kinerja (20%)	10,35	9,72	11,25	13,30	13,78
	<b>Total</b>	<b>48,24</b>	<b>56,16</b>	<b>65,61</b>	<b>70,19</b>	<b>72,13</b>

#### 6. Evaluasi Kinerja LHA lingkup Eselon I

Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian, dimana salah satu fungsi Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui evaluasi dan mendukung peran APIP sebagai *Quality Assurance* sesuai kebijakan pengawasan nasional dalam Permentan No. PER/03-1/M-PAN/3/2007 maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan Evaluasi Kinerja LHA lingkup 11 Eselon I Kementerian Pertanian, meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian.

Metode yang digunakan dalam tahap evaluasi adalah analisis deskriptif dengan sumber data dari Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal pada periode semester II tahun 2013 dan semester I tahun 2014 dengan menghasilkan laporan sebanyak 22 laporan atau 100% dari target 22 laporan.

## 7. Gerakan WTP

Sesuai Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003, Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK-L) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun dan disajikan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam pelaksanaannya, berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 16, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan memberikan opini *disclaimer* tahun 2005-2007 dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2008 – 2012 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) pada tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Jenderal Kementan terus berupaya merancang program aksi berupa kegiatan untuk tercapainya Laporan Keuangan yang berkualitas dengan mendapatkan opini WTP dengan nama Gerakan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2014 sebagai berikut:

### a. Audit Barang Milik Negara dalam rangka Mendukung Gerakan WTP lingkup Inspektorat I s.d. IV.

Tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Barang Milik Negara (BMN) dengan mengacu pada Peraturan MenPAN No.PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tujuan Audit BMN adalah menerbitkan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan terhadap proses penghapusan BMN. Kriteria yang digunakan dalam audit BMN adalah PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan



Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum TA 2011. Keragaan pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2014 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 15.**  
**Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2014**

IR	Eselon I	Pelaksanaan	Lokasi
I	Ditjen Hortikultura	27 s.d. 31 Oktober 2014	Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumut
II	Ditjen PSP	27 s.d. 31 Oktober 2014	Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, DIY, dan Sulsel
III	Ditjen PPHP, dan Badan Litbang Pertanian	27 s.d. 31 Oktober 2014	Jabar, Lampung, Kalteng, Jabar, dan Sumut
IV	Ditjen Peternakan dan Keswan	27 Oktober – 1 November 2014	Kalbar, Kalteng, Sulut, dan Sultra

**b. Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I dan Reviu Laporan Keuangan dalam rangka Mendukung Gerakan WTP**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2014 telah melaksanakan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan pada 17 s.d. 27 Januari 2014 di 33 propinsi.

**c. Reviu LK dalam rangka Mendukung Gerakan WTP**

Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA Kementerian Pertanian Semester II Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 28 Februari 2014. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA Kementerian Pertanian Semester I Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 25 Juli 2014. Untuk tingkat UAPPA/B E-1, Laporan Keuangan Semester II Tahun

2013 telah direviu pada tanggal 7 – 13 Februari 2014 dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 telah direviu pada 10 – 17 Juli 2014.

#### **8. Reviu RKA-KL 2014**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kementerian negara/lembaga melaksanakan reviu RKA-KL TA 2015 dimana tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-KL sesuai RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan kaidah-kaidah penanggaran lainnya serta telah dilengkapi dokumen pendukung RKA-KL.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila reviu menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-KL, maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan kepada unit penyusun anggaran untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian.

Kegiatan reviu RKA-KL TA 2015 lingkup 12 Eselon I telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 14 – 15 Juli 2014; 10 – 11 September 2014; 16 – 17 September 2014 dan 11 – 12 Nopember 2014 (*Refocusing*) di Bogor Jawa Barat.

#### **9. Audit Investigasi**

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang menyangkut aparatur daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi. Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada tahun 2014 realisasi jumlah audit investigasi berdasarkan pengaduan sebanyak 27 kasus atau 112,5% dari target 24 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 16.**  
**Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Tahun 2014**

No	Tema Investigasi/Pengaduan
1	Audit investigasi atas investigasi atas kinerja Satker Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang Prov. Jatim
2	Audit investigasi atas pengadaan <i>lift</i> penumpang pada satker Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Badan Litbang Pertanian TA 2013 di Bogor, Jabar
3	Audit investigasi terhadap kinerja Direktur Perlindungan Hortikultura, Ditjen Hortikultura di Jakarta
4	Audit investigasi atas pengaduan terhadap pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2014 pada Setjen Kementan di Jakarta, dan melakukan klarifikasi kepada Dr.Ir. Dinar Dwi Anugrah Putranto sebagai pihak pengadu di Palembang Provinsi Sumsel
5	Melakukan audit investigasi kegiatan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) Padi Non Hibrida Model Paket lengkap (data Kontingensi) dan pengembangan <i>Sistem of Rice Intensification (SRI)</i> tahun 2012 pada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kab.Tanah Datar Provinsi Sumsel
6	Audit investigasi atas pengaduan terhadap adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana PUAP di desa Balingbing, Kec. Pagaden. Kab. Subang Provinsi Jabar
7	Audit investigasi atas kinerja sumberdaya manusia STPP Malang Provinsi Jatim
8	Melakukan audit investigasi atas kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan TA 2009-2013 di Medan Provinsi Sumut
9	Audit investigasi terhadap tindakan & perilaku Drs. Hendrykris, MM selaku Kabag Perlengkapan Setjen di Jakarta
10	Audit investigasi pada STPP Magelang di Yogyakarta Provinsi DIY
11	Melakukan audit investigasi atas pelaksanaan Diklat Prajabatan tahun 2014 pada Pusat Manajemen dan Kepegawaian Pertanian (PPMKP) Ciawi, Jabar
12	Melakukan audit investigasi atas penerimaan/seleksi CPNS tahun 2013 pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan di Jakarta
13	Melakukan audit investigasi atas proses perizinan pupuk dan pestisida pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pestisida Pertanian dan Direktorat Pupuk dan Pestisida pada Ditjen PSP di Jakarta
14	Audit investigasi terhadap PNS di Ditjen Perkebunan yg diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai di Jakarta
15	Audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan penggunaan aset milik negara pada Kementan di Jakarta, Jabar, dan lokasi lain, berdasarkan pengaduan Ketua KPK RI
16	Audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan penggunaan aset milik negara pada Kementan, serta melakukan klarifikasi kepada PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), Pusat Penelitian & Pengembangan Perkebunan, Balai Penelitian & Pengembangan Tanaman Obat & Rempah (balitro) dan pihak terkait lainnya di Bogor, Jabar

17	Audit investigatif pendalaman LHA BPK RI No.9.C/LHP/XVII/05/2014 Tgl. 22-5-2014 kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Tahun 2013 pada Dinas Pertanian & Kelautan Kota Medan.
18	Audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan tindak karantina pertanian pada BKP Kelas I Semarang TA. 2013 - 2014 di Semarang
19	Audit investigatif terhadap dugaan program SLPTT/PATB Kedelai TA. 2014 di Pandeglang
20	Audit investigatif terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai BKP Kls I Bandar Lampung
21	Audit investigatif terhadap dugaan pelanggaran kode etik pegawai & disiplin PNS BBPP Ketindan
22	Audit investigasi atas pengadaan traktor roda empat 4 WD & implementasi Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Tanaman Semusim Wilayah, Jateng
23	Audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan proses pendaftaran obat hewan pada Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan di Jakarta
24	Audit terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan pelanggaran kode etik dan standar audit oleh tim audit kinerja di Satker Ditjen Hortikultura
25	Audit investigasi atas pimpinan Ditjen PSP di Jakarta
26	Audit investigasi terhadap pengadaan distribusi semen beku pada kegiatan optimalisasi inseminasi buatan (IB) di Satker Disnak dan Keswan Provinsi Sulsel (06) TA 2014
27	Audit investigasi tentang pengadaan dan penyaluran pupuk dan benih Hortikultura Satker Ditjen Hortikultura TA 2013 dan 2014 di Jakarta

Inspektorat Investigasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan audit investigasi selama kurun waktu tahun 2014 telah menerbitkan 27 laporan hasil audit investigasi.

#### 10. Audit Tujuan Tertentu

Audit tujuan tertentu didasarkan atas permintaan/petunjuk Menteri, dengan sasaran pengawasan dititikberatkan pada kegiatan yang menjadi isu-isu strategis di lingkup Kementerian Pertanian antara lain pengawasan terhadap pelayanan publik, pengawasan terhadap aset kementerian, pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan lain sebagainya. Audit tujuan tertentu yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan (200%) dari target 2(dua) laporan. Adapun kegiatan yang dilakukan audit sebagaimana terdiskripsi pada tabel dibawah ini:

**Tabel 17.**  
**Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu TA 2014**

No	Tema Audit Tujuan Tertentu
1	Audit tujuan tertentu pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan paket mekanisasi usaha tani kedelai tahun 2013 pada Ditjen TP

	di Jakarta
2	Audit tujuan tertentu kegiatan pengembangan sapi potong pada kegiatan UPPO tahun 2013 pada Satker Distannak Prov.Sulut; satker Disnak Kab.Minahasa; satker Disnak Manado, Prov.Sulut; Disnakwan Prov Sulteng; satker Disnak Kab.Sigi Prov.Sulteng
3	Audit tujuan tertentu kegiatan penumbuhan Kawasan Pengembangan Pengelolaan & Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) lingkup Ditjen PPHP
4	Audit tujuan tertentu kegiatan perluasan sawah TA 2013 pada satker : a. Distan Kab.Nias Barat di Prov.Sumut; Distannakbun dan Kehutanan Kab. Nias Selatan

Inspektorat Investigasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan audit tujuan tertentu selama kurun waktu tahun 2014 telah menerbitkan 4 laporan hasil audit tujuan tertentu.

### 11. Audit Sanggah Banding

Inspektorat Investigasi selama tahun 2014 telah melaksanakan Audit Sanggah Banding yang disampaikan oleh penyedia jasa terhadap kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada suatu kegiatan/program. Adapun jumlah audit terhadap sanggah banding telah dilakukan sebanyak 4 kali (40%) dari target 10 kali pelaksanaan Audit Sanggah Banding. Kegiatan Audit Sanggah Banding yang telah dilaksanakan dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 18.**  
**Keragaan Audit Sanggah Banding Tahun 2014**

No	Sanggah Banding
1	Audit sanggah banding pengadaan obat ternak sapi di BPTU HPT Padang Mangatas Provinsi Sumatera Barat
2	Pengadaan alat laboratorium pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi Jawa Barat
3	Paket pengadaan benih karet opas kegiatan Peremajaan Karet pada Dinas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat
4	Pengadaan <i>Vertical Dryer</i> pada satker Dinas Pertanian TP Provinsi Jawa Barat.

Inspektorat Investigasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan audit sanggah banding selama kurun waktu tahun 2014 telah menerbitkan 4 laporan hasil audit sanggah banding.

### 12. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan penyelenggaraan kegiatan SPIP ini adalah tercapainya pemahaman yang seragam bagi peserta terhadap SPI sesuai ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, sehingga dapat diterapkan secara optimal pada instansi masing-masing, yang diharapkan dengan

penerapan yang optimal maka kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pola yang dikembangkan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan amanah PP No 60 Tahun 2008 melalui Pembinaan SPIP, Penilaian SPI, dan Forum Nasional SPI. Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan SPIP selama periode tahun 2008 – 2014 lalu telah membina 5.518 pejabat sektor pertanian dari 33 propinsi di Indonesia, dengan harapan kelak Kementerian Pertanian dapat mewujudkan penerapan *good governance* dan *clean government*.

Pembinaan SPIP telah menghasilkan *output* yang mampu dimanfaatkan oleh setiap unit kerja dalam mengimplementasikan SPIP secara konkret, melalui penyusunan Juklak SPIP Pelayanan yang terdiri dari Pelayanan SDM, Sertifikasi Mutu Benih, Pelayanan Penelitian dan Pengembangan (litbang), Pelayanan Perbibitan, serta Pelayanan Karantina Pertanian.

Rangkaian kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

**a. Pembinaan SPIP**

Pembinaan SPIP dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 24 s.d. 26 Juni di Hotel JW Marriot Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 350 orang berasal dari UPT lingkup BPPSDM, Badan Karantina Pertanian, Badan Litbang Pertanian, dan Ditjen Peternakan dan Keswan wilayah Indonesia barat dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi se-Indonesia.

Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten antara lain Inspektur Jenderal Ir. R. Azis Hidajat, MM memberikan penjelasan materi berjudul "Pengendalian Intern Guna Wujudkan Pelayanan Prima dan Reviu SPIP"; Ketua Komisi Ombudsman Wilayah Jawa Timur, Agus Widiarta, dengan judul materi "Peran Komisi Ombudsman RI dalam Pengendalian Layanan Sektor Publik"; dan Ir. Suharyono, M.Si selaku Kepala Pusat PVTTP menyampaikan materi berjudul "Pelayanan Publik Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian" serta pemaparan 5 (lima) narasumber dari UPT yang membidangi pelayanan publik secara berurutan, yaitu:

1. Kepala BBPP Ketindan, Dr. Ir. Adang Warya, MM;
2. Kepala BBPPTP Jombang, Dr. Ahmad Sarjana;
3. Kepala BB Padi Sukamandi, Dr. Made Jana Mejaya;
4. Kepala BBPTU Sapi Perah Baturraden, Ir. Ali Rochman, M.Si;
5. Kepala BBKP Surabaya, Ir. Purwo Widiarto.

Pada sesi terakhir dilakukan Workshop Penyusunan SPI Pelayanan sebagai upaya mempermudah kinerja Satlak PI bidang pelayanan publik.

**b. Penilaian SPI**

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui penilaian penerapan SPI terhadap unit kerja Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian dengan menggunakan *checklist* sesuai PP 60 tahun 2008. *Checklist* yang digunakan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam SPI yaitu unsur lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian Informasi & Komunikasi dan Unsur Pemantauan. Selain itu untuk menilai kehandalan Satlak PI digunakan beberapa indikator yaitu: Kelembagaan, Kinerja, dan Kinerja 5 unsur. Berdasarkan *checklist* dan beberapa indikator tersebut, kemudian dilakukan pembobotan nilai yang diklasifikasikan berdasarkan Sangat Handal, Handal, Cukup Handal, dan Kurang Handal.

Sepanjang tahun 2014, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 167 Satlak PI dari total 178 Satlak PI yang terbentuk di lingkungan Kementan. Hasil penilaian Satlak PI menyimpulkan bahwa predikat Sangat Handal diraih oleh 62 satker (37,13%), predikat Handal diraih oleh 87 satker (52,10%), predikat Cukup Handal diraih oleh 17 satker (10,18%) dan predikat Kurang Handal diraih oleh 1 satker (0,60%). Dengan demikian, dari 167 Satlak PI yang dinilai sepanjang tahun 2014, terdapat total 166 Satlak PI yang berpredikat Sangat Handal, Handal, dan Cukup Handal (99,40%).

**Tabel 19.**  
**Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan**  
**Tahun 2010 – 2014**

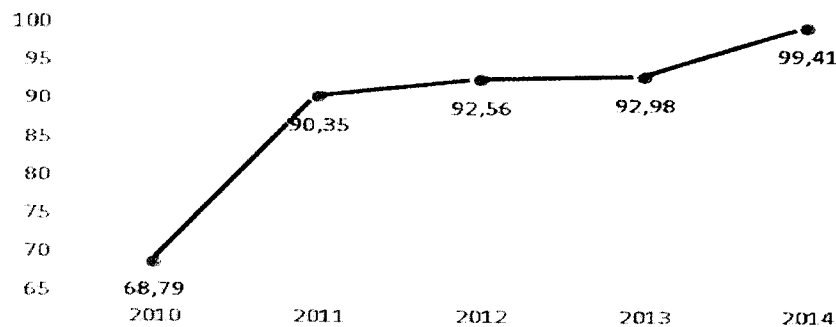
Tahun (1)	Satlak PI yang dinilai (2)	Berpredikat Sangat Handal (3)		Berpredikat Handal (4)		Berpredikat Cukup Handal (5)		Berpredikat Kurang Handal (6)	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2010	157	25	15,92	34	21,66	49	31,21	49	31,21
2011	145	70	48,28	37	25,52	24	16,55	14	9,66
2012	121	59	48,76	39	32,23	14	11,57	9	7,44
2013	157	32	20,38	84	53,50	30	19,10	11	7,01
2014	167	62	37,13	87	52,10	17	10,18	1	0,60
<b>Total</b>		<b>248</b>		<b>281</b>		<b>134</b>		<b>84</b>	

Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja yang telah menerapkan SPI dan dinilai cukup handal selama periode 2010 – 2014, terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini merupakan dampak atas pembinaan yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal sebagai penggerak SPI lingkup Kementerian Pertanian.

**Gambar 9**

**Unit Kerja dengan Predikat SPI Cukup Handal**



Tren capaian unit kerja dengan predikat SPI Cukup Handal

**c. Forum Nasional SPIP**

Forum Nasional SPIP diadakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pelaksana Satlak PI agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengawas intern di unit kerjanya masing-masing demi terciptanya *good governance* dan *clean government* di instansi Kementerian Pertanian.

Kegiatan Forum SPIP Kementerian Pertanian Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 23 s.d. 25 September 2014, berlokasi di Hotel Swiss Bell, Bali. Tema Forum Nasional SPIP Tahun 2013 adalah "Peran SPI dalam Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Bersih dan Berintegritas". Peserta yang hadir adalah seluruh Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian (termasuk UPT Pusat yang berlokasi di daerah) dengan total peserta yang hadir sebanyak 340 orang peserta.

**13. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi**

Upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca reformasi, diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2004 tentang



Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan untuk menuju perbaikan pada birokrasi pemerintah yang meliputi tata atur (tatalaksana), tata struktur (organisasi), tata aparatur (sumberdaya manusia) dan tata kultur (budaya) kerja, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, diharapkan juga akan membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang dituntut mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal wajib diupayakan realisasinya (*conditio sine quanon*), tidak hanya sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian kondisi tersebut, selain disebabkan kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi untuk akselerasi pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia, tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, tetapi dibutuhkan sebuah upaya nyata yang mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh aparat Kementerian Pertanian, salah satunya dengan menyelenggarakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK memiliki kedudukan vital dan strategis serta dipandang mampu berperan sebagai lokomotif utama untuk menarik 9 (sembilan) diktum yang tercantum dalam Inpres No.5 Tahun 2004, selain juga berperan sebagai *entry point* untuk terciptanya kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan program WBK di Kementerian Pertanian sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian periode 2010 – 2014 yang dinamakan Gerakan WBK. Tujuannya untuk menciptakan *island of integrity* di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu wilayah yang bebas dari KKN sebagai cerminan terwujudnya *clean government* dan *good governance* di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian. Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut meliputi: Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi, Kegiatan Penilaian dan Penetapan Unit Kerja WBK, serta Kegiatan Pemasyarakatan Anti Korupsi melalui Senam WBK dan Kampanye Anti Korupsi.

**a. Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK)**

Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) telah dilaksanakan sebanyak dua kali penyelenggaraan sepanjang tahun 2014 dengan total pegawai terbina sebanyak 900 pegawai dari target 800 pegawai, yang dibagi berdasarkan zona wilayah kerja yaitu Indonesia bagian timur dan tengah dan Indonesia bagian barat, yaitu:

- 1) Pembinaan KAK untuk wilayah Indonesia bagian timur dan tengah dilaksanakan di Yogyakarta, D.I. Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2014 di Hotel Serathon Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta yang terdiri dari UPT lingkup Kementerian Pertanian wilayah Indonesia bagian timur dan tengah (14 propinsi). Peserta yang hadir memiliki latar belakang sebagai pejabat setingkat KPA, PPK, Pejabat Eselon III/IV, bendahara, dan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa.
- 2) Pembinaan KAK untuk wilayah Indonesia bagian barat dilaksanakan di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, DKI Jakarta pada tanggal 3 s.d. 5 Desember 2014. Pembinaan KAK kali ini disesuaikan dengan arahan Presiden RI ke-7 yang menggiatkan gerakan Revolusi Mental bagi apatur sipil negara, sehingga **Pembinaan KAK berubah menjadi Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK)**. PERMAK yang dilaksanakan di Jakarta ini diikuti oleh 550 peserta yang terdiri dari UPT lingkup Kementerian Pertanian wilayah Indonesia bagian barat (14 propinsi), BUMN, dan undangan kementerian/lembaga lain. Peserta yang hadir memiliki latar belakang sebagai pejabat setingkat KPA, PPK, Pejabat Eselon III/IV, bendahara, dan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa.

**b. Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).**

Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 telah berhasil mengusulkan penetapan 187 unit kerja lingkup Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 81,30% dari 230 unit kerja yang dinilai.

Di sisi lain, bila data penilaian unit kerja berpredikat WBK selama lima tahun terakhir disandingkan, maka disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil meningkatkan nilai persentase capaian unit kerja berpredikat WBK dari tahun ke tahun. Nilai persentase jumlah unit kerja berpredikat WBK mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 3,94% dari capaian tahun 2013 sebesar 76,49%. Hal ini dapat menunjukkan Inspektorat Jenderal telah mampu berperan dalam peningkatan integritas satker secara mandiri di tahun 2013, sehingga pada tahun berikutnya,

sebagian besar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan predikat WBK yang telah disandingnya dengan penuh tanggungjawab. Capaian unit kerja berpredikat WBK dari periode tahun 2010 - 2014, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 20.**  
**Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker)</b>	<b>%</b>	<b>% Tren</b>
2010	225	92	41,78	-
2011	225	108	48,00	6,22
2012	225	120	53,33	5,33
2013	217	166	76,49	23,16
2014	230	187	81,30	3,94

Keberhasilan Inspektorat Jenderal Kementan dalam mencapai target sasaran unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja WBK merupakan dampak terlaksananya pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) bagi pegawai Kementerian Pertanian yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2014 dengan total pegawai terbina sebanyak 900 pegawai atau lebih dari 5.444 pegawai terbina selama kurun waktu 2011 s.d. 2014.

Pada pelaksanaan pembinaan Komitmen Anti Korupsi yang dilaksanakan pada bulan Desember 2014 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2014 di Jakarta, telah dikembangkan metode baru Pembinaan Komitmen Anti Korupsi melalui Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK).

Diperkuat juga dengan penilaian eksternal yang dilaksanakan oleh KPK dalam survei integritas tahun 2014 dengan hasil prestasi bahwa Kementerian Pertanian menduduki ranking 2 dari 26 kementerian/lembaga dengan nilai 7,80 meningkat setelah pada tahun 2013 yang lalu, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 7,49 dengan prestasi ranking 5 dari 20 kementerian/lembaga serta Kementerian Pertanian mendapatkan anugerah Apresiasi KPK sebagai Kementerian Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Terbaik I Tahun 2014 dan Kementerian dengan Jumlah Laporan Gratifikasi Terbanyak dan 99,11% Tepat Waktu Tahun 2014.

**c. Peringatan Hari Anti Korupsi Tahun 2014 (Hakordia)**

**1) Kampanye Anti Korupsi**

Kampanye anti korupsi Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Jenderal, mengiringi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2014. Kegiatan kampanye dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2014, berlangsung selama 3 jam, dimulai pada pukul 06.00 – 9.00 WIB di 2 titik utama di Bundaran HI dan perempatan Ragunan, dengan aktivitas sosialisasi melalui pembagian bunga mawar merah dan putih kepada masyarakat pengguna jalan dan stiker-stiker yang berisikan ajakan untuk tolak korupsi dan gratifikasi.

**2) Senam Bersama WBK**

Pada tanggal 12 Desember 2014, Inspektorat Jenderal melakukan senam bersama di lapangan kantor pusat Kementerian Pertanian. Hadir dalam kesempatan ini sebanyak kurang lebih 750 pegawai berasal dari 12 unit eselon I Kementerian Pertanian.

Senam bersama ini diwujudkan dalam rangka menggugah peserta senam untuk mulai melakukan perubahan pada dirinya untuk hidup sehat, baik fisik maupun mental. Mental yang dimaksud adalah kebersihan dalam menolak melakukan tindak-tindak koruptif yang dapat mencemari jiwa dan tentunya dapat berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungan kerja di sekelilingnya.

**14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat**

**a. Diklat Reviu RKA-KL**

Penyelenggaraan Diklat Reviu RKA-KL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kapus PPMKP Nomor : 75.1/Kpts/SM.100/J.3.1/7/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Penunjukan Penyelenggaraan *Budget Reviewer Training* (Diklat Reviu RKA-KL) Lingkup Itjen Kementan. Diklat Reviu RKA-KL dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 – 18 Juli 2014 di Komplek Bumi, PPMKP Ciawi. Peserta diklat adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari para auditor lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Sekretariat dengan total peserta 30 orang. Diklat Reviu RKA-KL dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap tentang reviu RKA-KL.

**b. Diklat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Penyelenggaraan Diklat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kapus PPMKP Nomor : 75.2/Kpts/SM.100/J.3.1/7/2014 tanggal 5

Juli 2014 tentang Penunjukan Penyelenggaraan Diklat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Itjen Kemtan Tahun 2014. Diklat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 – 18 Juli 2014 di Komplek Bumi, PPMKP Ciawi. Peserta diklat adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari para auditor lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi dengan total peserta 31 orang. Diklat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para auditor dalam teknis pelaksanaan tugas-tugas audit investigasi dan audit tujuan tertentu.

Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan diklat dilakukan evaluasi diklat. Ruang lingkup evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi: seluruh peserta diklat hadir dengan tertib; evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat diperoleh predikat sangat baik; dan seluruh peserta diklat dapat menyerap materi yang telah disampaikan dengan kecenderungan terjadi kenaikan nilai dari Pre-Test ke Post-Test.

#### **15. Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2014 tertera pada tabel dibawah ini :

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
LAPORAN TAHUN 2014

Tabel. 21.

Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2014

NO	KEGIATAN/OUTPUT BELANJA MODAL	PAGU (Rp.000)	TARGET FISIK	REALISASI			
				S.D DESEMBER 2014			
				ANGGARAN (Rp.000)	%	FISIK	%
<b>1</b>	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR</b>						
	a. Sice Pimpinan	7,500	1 SET	7,500	100	1 SET	100
	b. Meja Komputer Server (Absensi)	2,750	1 UNIT	2,650	96.36	1 UNIT	100
	c. Kursi Pimpinan	26,000	1 UNIT	25,000	96.15	1 UNIT	100
	d. Rak Arsip Besi	12,000	6 UNIT	12,000	100	6 UNIT	100
	e. Faksimili	37,500	10 UNIT	36,800	98.13	10 UNIT	100
	f. CCTV	41,600	8 UNIT	40,850	98.20	8 UNIT	100
<b>2</b>	<b>PENATAAN RUANG KERJA</b>						
	a. Penataan Ruang Kerja DPLHA	39,000	1 PAKET	152,970	80.14	1 PAKET	100
	b. Horizontal Blind Ruang Inspektur II	5,670	18 M2			18 M2	100
	c. Karpet Ruang Kerja Pimpinan	146,200	344 M2			344 M2	100
<b>3</b>	<b>PENATAAN GUDANG</b>						
	Penataan Gudang	100,000	114 M2	100,000	100	114 M2	100
<b>4</b>	<b>PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI</b>						
	a. Camera Kancing	2,000	2 UNIT	1,880	94.00	2 UNIT	100
	b. Voice Recorder	4,500	3 UNIT	4,485	99.67	3 UNIT	100
	c. Jam Tangan Kamera	5,925	3 UNIT	5,550	93.67	3 UNIT	100
	d. Kacamata Spy Cam	5,250	3 UNIT	4,920	93.71	3 UNIT	100
	e. Mesin Foto Copy	37,700	1 UNIT	34,380	91.19	1 UNIT	100
	f. HT Alinco DI-C7	16,200	6 UNIT	15,600	96.30	6 UNIT	100
	g. Mesin Operator Telephone (PABX)	9,300	2 UNIT	9,070	97.53	2 UNIT	100
	h. Projector Portable Tripod	11,000	4 UNIT	10,680	97.09	4 UNIT	100
	i. Eksternal Hardisk	33,800	26 UNIT	33,800	100	26 UNIT	100

## **BAB VI**

# **P E N U T U P**

Pada tahun 2014 secara umum capaian kegiatan Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diperlukan pengendalian yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih akuntabel dari sisi pelaporan, diperlukan analisa yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut perlu dilakukan agar laporan tahunan ini lebih efektif sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lebih bermanfaat bagi *stakeholder*.

## LAMPIRAN



## LAMPIRAN



## LAPORAN PROGRES PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA BULAN DESEMBER TAHUN 2014

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
			Rp.	Rp.	%	Vol	Satuan	Vol	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	018.02.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>65.528.157.000</b>	<b>60.170.175.450</b>	<b>91,82</b>					<b>101,86</b>
I	1755	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Inspektorat I)</b>	<b>6.041.800.000</b>	<b>5.740.349.850</b>	<b>95,01</b>					<b>101,54</b>
		002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian	427.000.000	410.206.950	96,07	8	Laporan	8	Laporan	100,00
		004 Audit Kinerja	3.906.800.000	3.770.733.296	96,52	104	satker	112	satker	107,69
		005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I dan Kementan	409.000.000	313.784.900	76,72	4	Laporan	4	Laporan	100,00
		006 Evaluasi Kegiatan Strategis	303.000.000	292.911.010	96,67	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat I	<b>996.000.000</b>	<b>952.713.694</b>	<b>95,65</b>	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		Gerakan WTP	<b>980.580.000</b>	<b>939.974.694</b>	<b>95,86</b>					
		a. Audit BMN dlm rangka mendukung gerakan WTP	269.205.000	<b>236.285.894</b>	87,77					
		d. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dlm rangka mendukung gerakan WTP	711.375.000	703.688.800	98,92					
		Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I	<b>15.420.000</b>	<b>12.739.000</b>	<b>82,61</b>					
II	1756	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan (Inspektorat II)</b>	<b>5.044.700.000</b>	<b>4.791.272.820</b>	<b>94,98</b>					<b>100,00</b>
		002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	307.000.000	260.378.700	84,81	6	Laporan	6	Laporan	100,00
		004 Audit Kinerja	3.846.800.000	3.738.849.290	97,19	104	satker	105	satker	100,96
		005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	309.000.000	257.237.780	83,25	3	Laporan	3	Laporan	100,00
		006 Evaluasi Kegiatan Strategis	303.000.000	266.501.750	87,95	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat II	278.900.000	268.305.300	96,20	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		Gerakan WTP	264.978.000	255.285.300	96,34					
		a. Audit BMN dlm rangka mendukung gerakan WTP	102.018.000	95.413.300	93,53					
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dlm rangka mendukung gerakan WTP	162.960.000	159.872.000	98,11					
		Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup Inspektorat II	13.922.000	13.020.000	93,52					
III	1757	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian (Inspektorat III)</b>	<b>5.045.000.000</b>	<b>4.882.654.836</b>	<b>96,78</b>					<b>100,00</b>
		002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	307.000.000	272.103.200	88,63	6	Laporan	6	Laporan	100,00
		004 Audit Kinerja	3.861.000.000	3.807.169.894	98,61	104	satker	105	satker	100,96
		005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	309.000.000	289.579.750	93,72	3	Laporan	3	Laporan	100,00
		006 Evaluasi Kegiatan Strategis	303.000.000	263.380.092	86,92	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat III	265.000.000	250.421.900	94,50	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		Gerakan WTP	250.480.000	244.179.400	97,48					
		a. Audit BMN dlm rangka mendukung gerakan WTP	98.340.000	96.449.400	98,08					
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dlm rangka mendukung	152.140.000	147.730.000	97,10					
		Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup Inspektorat III	14.520.000	6.242.500	42,99					
IV	1758	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Inspektorat IV)</b>	<b>5.050.000.000</b>	<b>4.917.109.225</b>	<b>97,37</b>					<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	307.000.000	245.520.502	79,97	6	Laporan	6	Laporan	100,00
		004 Audit Kinerja	3.880.000.000	3.844.459.455	99,08	104	satker	105	satker	100,96
		005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	309.000.000	294.836.550	95,42	3	Laporan	3	Laporan	100,00
		006 Evaluasi Kegiatan Strategis	303.000.000	285.283.200	94,15	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat IV	251.000.000	247.009.518	98,41	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		Gerakan WTP	236.180.000	235.093.518	99,54					
		a. Audit BMN dlm rangka mendukung gerakan WTP	90.116.000	89.584.518	99,41					
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dlm rangka mendukung Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup Inspektorat IV	146.064.000	145.509.000	99,62					
			14.820.000	11.916.000	80,40					
V	1759	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian (Inspektorat Investigasi)</b>	<b>5.201.800.000</b>	<b>4.650.679.892</b>	<b>89,41</b>					<b>110,50</b>
		002 Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti korupsi	2.636.700.000	2.397.430.954	90,93	1	Laporan	1	Laporan	100,00
		003 Audit Sanggah banding	200.800.000	107.191.500	53,38	10	Laporan	4	Laporan	40,00
		004 Audit Khusus/Investigasi	1.057.200.000	917.982.265	86,83	24	Kasus	27	Kasus	112,50
		005 Audit dengan Tujuan Tertentu	1.250.000.000	1.177.565.173	94,21	2	Laporan	4	Laporan	200,00
		008 Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi	57.100.000	50.510.000	88,46	2	Laporan	2	Laporan	100,00
VI	1760	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal</b>	<b>39.144.857.000</b>	<b>35.188.108.827</b>	<b>89,89</b>					<b>100,00</b>
		001 Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan pengawasan	402.800.000	222.528.827	55,25	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00
		002 Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas, data dan pemantauan LHA serta laporan progres kegiatan pengawasan	3.663.500.000	3.104.164.281	84,73	10	Laporan	10	Laporan	100,00
		003 Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas serta data dan	4.363.600.000	4.264.118.385	97,72	3	Laporan	3	Laporan	100,00
		004 Laporan pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementan	5.759.500.000	5.304.225.449	92,10	7	Laporan	7	Laporan	100,00
		005 Dokumen analisis LHA	403.200.000	214.974.300	53,32	2	Laporan	2	Laporan	100,00
		006 Diklat fungsional dan teknis bidang	408.700.000	257.806.000	63,08	2	Diklat	2	Diklat	100,00
		010 Sarana dan Prasarana Perkantoran	563.325.000	519.504.480	92,22	3	unit	3	unit	100,00
		994 Layanan Perkantoran	23.443.557.000	21.169.521.605	90,30	12	Bulan	12	Bulan	100,00
		996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	136.675.000	131.265.500	96,04	52	unit	52	unit	100,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>65.528.157.000</b>	<b>60.170.175.450</b>	<b>91,82</b>					<b>101,86</b>

**REKAPITULASI REALISASI SATKER DAN ANGGARAN YG DIPERIKSA ITJEN KEMTAN  
TAHUN 2014**

NO	URAIAN															TOTAL PER IR	
		I (10/2 - 25/2/14)		II (17/3 - 1/4/14)		RIK PUSAT (April-Mei)		III (9/6 - 24/6/14)		IV (11/8 - 26/8/14)		V (22/9 - 7/10/14)		VI (12/11 - 27/11/14)			
		SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG	SATKER	ANGG
01	02	05	06					07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeriksaan Kinerja Ir. I																
	Daerah																
	SETJEN 01	0	0	0	0	5	434.382.895	0	0	0	0	3	102.651.430	0	0	8	537.034.325
	DITJEN HORTI 04	11	45.230.030	13	27.316.504	1	430.473.723	9	25.756.798	9	35.636.431	7	27.539.331	6	49.502.805	56	641.455.622
	BP&PSDMP 10	5	128.711.484	3	56.019.256	1	295.621.289	9	110.485.715	7	76.243.362	11	186.725.700	12	265.437.427	48	1.119.244.233
																112	2.297.734.180
2	Pemeriksaan Kinerja Ir.II																
	Daerah																
	DITJEN TP 03	14	111.270.676	11	93.557.212	1	650.914.418	12	103.942.074	9	55.448.741	12	417.425.771	11	127.500.286	70	1.560.059.178
	DITJEN PSP 08	0	0	4	148.589.130	1	1.139.556.854	3	104.631.760	3	89.203.310	3	261.346.840	3	292.344.180	17	2.035.672.074
	BKP 11	2	14.838.200	3	44.895.850	1	86.815.210	3	11.019.000	4	21.833.000	3	25.233.000	2	31727500	18	236.361.760
																105	3.832.093.012
3	Pemeriksaan Kinerja Ir.III																
	Daerah																
	DITJEN BUN 05	3	62.998.674	2	324.547.265	1	341.386.978	5	254.345.396	8	236.351.483	7	176.712.050	7	107.794.335	33	1.504.136.181
	DITJEN PPHP 07	5	77.913.853	2	34.265.805	1	310.031.110	4	64.826.000	3	23.184.430	5	78.871.502	4	45.053.380	24	634.146.080
	LITBANG 09	8	221.302.753	12	306.170.614	1	202.006.114	9	187.070.243	7	67.121.056	6	105.882.144	5	93.448.342	48	1.183.001.266
																105	3.321.283.527
4	Pemeriksaan Kinerja Ir.IV																
	Daerah																
	ITJEN KEMTAN 02	0	0	0	0	1	69836927	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69.836.927
	DITJEN NAK 06	12	226.244.432	10	232.788.821	1	290.706.323	11	191.353.605	9	179.051.147	9	263.142.122	9	280.217.585	61	1.663.504.035
	BARANTAN 12	4	44.970.174	6	138.614.210	1	132.212.982	7	89.908.328	9	66.979.108	8	76.298.245	8	92.575.042	43	641.558.089
																105	2.374.899.051
																427	11.826.009.770

**REKAP DATA KEPEGAWAIAN ITJEN KEMTAN  
PER 1 DESEMBER 2014**

**A. KONDISI BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN**

**= 285 Orang**

**1. PEJABAT STRUKTURAL**

**= 24 Orang**

1. Eselon I : 1
2. Eselon II: 7 Orang
3. Eselon III: 4 Orang
4. Eselon IV: 13 Orang

**2. PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR**

**= 157 Orang**

1. Auditor Utama : 16 Orang
2. Auditor Madya : 59 Orang
3. Auditor Muda : 37 Orang
4. Auditor Pertama : 39 Orang
5. Calon Auditor : 6 Orang

**3. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU**

**= 11 Orang**

1. Analis Kepegawaian Pertama : 1 Orang
2. Analis Kepegawaian Penyelia : 1 Orang
3. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan : 1 Orang
4. Perencana Muda : 1 Orang
5. Perencana Pertama : 3 Orang
6. Arsiparis Pertama : 3 Orang
7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda : 1 Orang

**4. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)**

**= 93 Orang**

**B. KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**

**= 285 Orang**

1. Golongan IV : 89
2. Golongan III : 162
3. Golongan II : 32
4. Golongan I : 2

Jumlah Pegawai secara keseluruhan sebanyak 285 terdiri dari :

1. IV/e : 2	3. III/d : 41	5. II/d : 8	1. I/d : 2
2. IV/d : 20	2. III/c : 35	2. II/c : 12	2. I/c : 0
3. IV/c : 26	3. III/b : 53	3. II/b : 8	3. I/b : 0
4. IV/b : 16	4. III/a : 33	4. II/a : 4	4. I/a : 0
5. IV/a : 25			

**C. KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

**= 285 Orang**

1. S3 : 122 Orang
2. S2 : 108 Orang
3. S1 : 0 Orang
4. D4 : 5 Orang
5. D3 : 41 Orang
6. SLTA : 5 Orang
7. SLTP : 4 Orang
8. SD : 0 Orang

**D. KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

**= 285 Orang**

1. PRIA : 179 Orang
2. WANITA : 106 Orang

**E. KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN AGAMA**

**= 285 Orang**

1. Islam : 264 Orang
2. Protestan : 14 Orang
3. Katholik : 6 Orang
4. Hindu : 1 Orang

**REKAPITULASI LAPORAN HASIL AUDIT  
HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN  
TAHUN 2014**

No	ESELON I	TARGET PEMBERANGKATAN							REALISASI PEMBERANGKATAN							JUMLAH TARGET	JUMLAH REALISASI KESELURUHAN	KET
		I	II	III	IV	V	VI	PUSAT	I	II	III	IV	V	VI	PUSAT			
1	SETJEN	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	3	0	5	8	8	0
2	DITJEN HORTIKULTURA	11	13	9	9	7	6	1	11	13	9	9	7	6	0	56	55	1
3	BADAN PPSDMP	5	3	9	7	11	12	1	5	3	9	7	11	12	1	48	48	0
4	DITJEN TANAMAN PANGAN	14	11	12	9	12	11	1	14	11	12	9	12	11	1	70	70	0
5	DITJEN PSP	0	4	3	3	3	3	1	0	4	3	3	3	3	1	17	17	0
6	BADAN KETAHANAN PANGAN	2	3	3	4	3	2	1	2	3	3	4	3	2	1	18	18	0
7	DITJEN PERKEBUNAN	3	2	5	8	7	7	1	3	2	5	8	7	7	1	33	33	0
8	DITJEN PPHP	5	2	4	3	5	4	1	5	2	4	3	5	4	1	24	24	0
9	BADAN LITBANG PERTANIAN	8	12	9	7	6	5	1	8	12	9	7	6	5	1	48	48	0
10	DITJEN PKH	12	10	11	9	9	9	1	12	10	11	9	9	9	1	61	61	0
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	4	6	7	9	8	8	1	4	6	7	9	8	8	1	43	43	0
12	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>427</b>	<b>426</b>	<b>1</b>

Mengetahui,  
Kabag DPLHA



Retno Dewi Susilowati

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN  
DI SETJEN KEMENTAN DARI TAHUN 1989/1990 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA (RP)	PENYELESAIAN (RP)	SISA (RP)	%
1	S.D. Tahun 2005	3.342.325.673,03	3.099.042.389,53	243.283.283,50	7,28
2	2006	1.316.601.725,60	1.279.119.910,00	37.481.815,60	2,85
3	2007	84.357.500,00	84.357.500,00	-	-
4	2009	1.474.820.749,00	402.883.227,00	1.071.937.522,00	72,68
5	2010	190.746.423,00	190.746.423,00	-	-
6	2011	114.599.720,32	114.599.720,32	-	-
7	2012	347.051.217,00	310.676.617,00	36.374.600,00	10,48
8	2013	608.713.534,50	608.713.534,50	-	-
9	2014	311.837.274,83	291.359.774,83	20.477.500,00	
	<b>J U M L A H</b>	<b>7.791.053.817,28</b>	<b>6.381.499.096,18</b>	<b>1.409.554.721,10</b>	<b>18,09</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI DITJEN TP DARI TAHUN 1990/1991 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	8.617.603.670,91	8.201.261.433,20	416.342.237,71	4,83
2	2006	903.132.551,90	697.192.551,90	205.940.000,00	22,80
3	2007	2.008.243.503,90	1.932.460.033,90	75.783.470,00	3,77
4	2008	1.934.923.425,82	1.546.679.957,62	388.243.468,20	20,07
5	2009	656.673.653,27	551.366.677,27	105.306.976,00	16,04
6	2010	173.737.522,00	173.737.522,00	-	-
7	2011	272.204.452,00	261.934.452,00	10.270.000,00	3,77
8	2012	244.718.070,00	244.718.070,00	-	-
9	2013	18.188.051.499,42	8.374.816.967,42	9.813.234.532,00	53,95
10	2014	4.929.029.531,00	4.526.259.905,00	402.769.626,00	8,17
<b>J U M L A H</b>		<b>37.928.317.880,22</b>	<b>26.510.427.570,31</b>	<b>11.417.890.309,91</b>	<b>30,10</b>



**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI DITJEN HORTIKULTURA DARI TAHUN 1998/1999 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	1.264.736.694,56	1.264.736.694,56	-	-
2	2006	529.390.484,75	529.390.484,75	-	-
3	2007	338.367.797,31	318.949.295,00	19.418.502,31	5,74
4	2008	487.157.514,27	487.157.514,27	-	-
5	2009	372.362.807,79	372.362.807,79	-	-
6	2010	193.510.621,06	193.510.621,06	-	-
7	2011	462.861.976,35	462.861.976,35	-	-
8	2012	373.138.257,00	372.638.257,00	500.000,00	0,13
9	2013	733.806.119,86	657.909.055,86	75.897.064,00	10,34
10	2014	625.855.105,80	332.690.941,50	293.164.164,30	
	<b>J U M L A H</b>	<b>5.381.187.378,75</b>	<b>4.992.207.648,14</b>	<b>388.979.730,61</b>	<b>7,23</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI DITJEN PERKEBUNAN DARI TAHUN 1998/1999 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	2005	3.495.647.093,45	3.450.282.223,45	45.364.870,00	1,30
2	2006	774.937.311,65	774.937.311,65	-	-
3	2007	826.591.955,09	826.591.955,09	-	-
4	2008	699.137.325,41	660.981.725,41	38.155.600,00	5,46
5	2009	1.784.913.397,44	1.535.039.219,44	249.874.178,00	14,00
6	2010	658.394.916,73	658.394.916,73	-	-
7	2011	2.950.092.012,28	2.832.624.012,28	117.468.000,00	3,98
8	2012	3.141.690.222,32	2.354.262.870,32	787.427.352,00	25,06
9	2013	3.339.148.828,50	774.957.756,00	2.564.191.072,50	76,79
10	2014	13.404.676.435,74	11.940.344.976,74	1.464.331.459,00	10,92
<b>J U M L A H</b>		<b>31.075.229.498,61</b>	<b>25.808.416.967,11</b>	<b>5.266.812.531,50</b>	<b>16,95</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI DITJEN PETERNAKAN DARI TAHUN 2000 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	3.700.621.958,33	3.578.479.755,33	122.142.203,00	3,30
2	2006	409.058.827,66	282.780.800,11	126.278.027,55	30,87
3	2007	1.716.397.784,94	1.505.539.157,94	210.858.627,00	12,28
4	2008	623.427.871,56	619.405.371,56	4.022.500,00	0,65
5	2009	3.979.434.545,11	3.921.150.545,11	58.284.000,00	1,46
6	2010	1.848.796.201,46	1.827.456.201,46	21.340.000,00	1,15
7	2011	877.763.649,88	877.763.649,88	-	-
8	2012	900.378.221,60	900.378.221,60	-	-
9	2013	3.189.650.133,55	2.473.711.306,22	715.938.827,33	22,45
10	2014	7.727.075.241,20	6.636.322.127,86	1.090.753.113,34	14,12
	<b>J U M L A H</b>	<b>24.972.604.435,29</b>	<b>15.986.665.009,21</b>	<b>2.349.617.298,22</b>	<b>9,41</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN  
DI DITJEN P2HP DARI TAHUN 2000 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	559.141.025,64	559.141.025,64	-	-
2	2006	655.778.296,88	655.778.296,88	-	-
3	2007	725.414.444,85	725.414.444,85	-	-
4	2008	946.997.840,28	946.997.840,28	-	-
5	2009	401.838.000,12	397.737.999,87	4.100.000,25	1,02
6	2010	339.354.999,54	335.879.999,54	3.475.000,00	1,02
7	2011	92.157.800,50	92.157.800,50	-	-
8	2012	94.708.120,00	94.708.120,00	-	-
9	2013	361.420.081,93	361.420.081,93	-	-
10	2014	567.373.873,75	348.624.632,00	218.749.241,75	38,55
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.744.184.483,49</b>	<b>4.517.860.241,49</b>	<b>226.324.242,00</b>	<b>4,77</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI DITJEN PSP DARI TAHUN 2001 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	2005	178.901.814,41	178.901.814,41	-	-
2	2006	118.262.272,70	118.262.272,70	-	-
3	2007	139.216.659,69	130.891.659,69	8.325.000,00	5,98
4	2008	1.910.581.958,03	1.910.581.958,03	-	-
5	2009	463.817.996,73	435.333.597,73	28.484.399,00	6,14
6	2010	339.354.999,54	335.879.999,54	3.475.000,00	1,02
7	2011	92.157.800,50	92.157.800,50	-	-
8	2012	94.708.120,00	94.708.120,00	-	-
9	2013	2.106.211.722,00	2.106.211.722,00	-	-
10	2014	1.684.288.936,70	1.135.622.526,00	548.666.410,70	
	<b>J U M L A H</b>	<b>7.127.502.280,30</b>	<b>6.538.551.470,60</b>	<b>588.950.809,70</b>	<b>8,26</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI BADAN LITBANG DARI TAHUN 1997/1998 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	2.472.843.290,39	2.424.361.485,39	48.481.805,00	1,96
2	2006	1.013.088.826,08	1.013.088.826,08	-	-
3	2007	726.831.750,17	703.646.975,17	23.184.775,00	3,19
4	2008	969.223.350,55	949.617.350,55	19.606.000,00	2,02
5	2009	1.214.669.578,85	1.164.669.887,85	49.999.691,00	4,12
6	2010	1.033.731.510,75	1.027.191.010,75	6.540.500,00	0,63
7	2011	2.328.297.521,37	1.924.424.701,37	403.872.820,00	17,35
8	2012	2.107.552.305,89	2.107.552.305,89	-	-
9	2013	2.235.653.235,46	2.229.353.235,46	6.300.000,00	0,28
10	2014	2.980.060.944,87	2.841.876.616,09	138.184.328,78	4,64
<b>J U M L A H</b>		<b>17.081.952.314,38</b>	<b>16.385.782.394,60</b>	<b>696.169.919,78</b>	<b>4,08</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI BKP DARI TAHUN 2004 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	46.134.992,00	46.134.992,00	-	-
2	2007	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
3	2008	57.288.415,50	57.288.415,50	-	-
4	2009	25.133.750,00	25.133.750,00	-	-
5	2010	54.076.000,00	54.076.000,00	-	-
6	2011	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-
7	2012	109.867.428,00	109.867.428,00	-	-
8	2013	88.563.505,00	88.563.505,00	-	-
9	2014	160.435.873,00	137.458.473,00	22.977.400,00	14,32
<b>J U M L A H</b>		<b>553.899.963,50</b>	<b>530.922.563,50</b>	<b>22.977.400,00</b>	<b>4,15</b>

| 73.974.187,57 |

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN  
DI BADAN SDM DARI TAHUN 1991/1992 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	1.566.770.505,20	1.544.720.505,20	22.050.000,00	1,41
2	2006	605.950.585,55	605.950.585,55	-	-
3	2007	635.245.497,90	635.245.497,90	-	-
4	2008	1.705.995.708,00	1.542.907.608,00	163.088.100,00	9,56
5	2009	1.291.737.652,06	1.275.261.652,06	16.476.000,00	1,28
6	2010	586.469.412,20	578.469.412,20	8.000.000,00	1,36
7	2011	741.457.673,11	741.457.673,11	-	-
8	2012	897.959.889,86	897.959.889,86	-	-
9	2013	1.355.728.390,68	1.355.728.390,68	-	-
10	2014	1.723.447.177,34	1.596.895.177,34	126.552.000,00	7,34
<b>J U M L A H</b>		<b>11.110.762.491,90</b>	<b>10.774.596.391,90</b>	<b>336.166.100,00</b>	<b>3,03</b>



**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
DI BADAN KARANTINA DARI TAHUN 2002 S.D 2014**

NO.	TA.	KERUGIAN NEGARA	PENYELESAIAN	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	3.497.735.779,11	3.497.735.779,11	-	-
2	2006	627.071.198,22	627.071.198,22	-	-
3	2007	490.640.493,69	490.640.493,69	-	-
4	2008	862.122.285,66	862.122.285,66	-	-
5	2009	196.696.050,23	196.696.050,23	-	-
6	2010	459.948.698,77	459.948.698,77	-	-
7	2011	343.791.728,41	343.791.728,41	-	-
8	2012	409.628.141,59	409.628.141,59	-	-
9	2013	2.441.485.413,61	2.441.485.413,61	-	-
10	2014	520.869.988,00	485.249.988,00	35.620.000,00	6,84
	<b>J U M L A H</b>	<b>9.849.989.777,29</b>	<b>9.814.369.777,29</b>	<b>35.620.000,00</b>	<b>0,36</b>

**JUMLAH KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTAN  
PER ESELON I SAMPAI DENGAN TAHUN 2014**

NO.	ESELON I	KERUGIAN NEGARA (RP)	PENYELESAIAN (RP)	SISA (RP)	%
1	SETJEN	7.791.053.816,28	6.381.499.095,18	1.409.554.721,10	18,09
2	DITJEN TANAMAN PANGAN	37.928.317.880,22	26.510.427.570,31	11.417.890.309,91	30,10
3	DITJEN HOTIKULTURA	5.381.187.378,75	4.992.207.648,14	388.979.730,61	7,23
4	DITJEN PERKEBUNAN	35.113.344.687,90	29.637.001.446,85	5.476.343.241,05	15,60
5	DITJEN NAK & KESWAN	20.934.489.246,00	18.794.402.657,33	2.140.086.588,67	10,22
6	DITJEN PPHP	4.265.795.577,28	4.006.761.936,53	259.033.640,75	6,07
7	DITJEN PSP	12.398.939.435,47	11.005.167.886,52	1.393.771.548,95	11,24
8	BADAN LITBANG	17.081.952.314,38	16.385.782.394,60	696.169.919,78	4,08
9	BADAN SDM	11.110.762.491,90	10.774.596.391,90	336.166.100,00	3,03
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	553.899.963,50	530.922.563,50	22.977.400,00	4,15
11	BADAN KARANTINA	9.849.989.777,54	9.814.369.777,54	35.620.000,00	0,36
<b>J U M L A H</b>		<b>162.409.732.569,22</b>	<b>138.833.139.368,40</b>	<b>23.576.593.200,82</b>	<b>14,52</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN  
PER TAHUN DARI TAHUN 1998/1999 S.D 2014**

NO.	TAHUN ANGGARAN	KERUGIAN NEGARA (RP)	PENYELESAIAN (RP)	SISA (RP)	%
1	S.d. 2005	28.742.462.497,03	27.844.798.097,82	897.664.399,21	3,12
2	2006	6.953.272.080,99	6.583.572.237,84	369.699.843,15	5,32
3	2007	7.700.307.387,54	7.362.737.013,23	337.570.374,31	4,38
4	2008	10.196.855.695,08	9.583.740.026,88	613.115.668,20	6,01
5	2009	11.862.098.180,60	10.277.635.414,35	1.584.462.766,25	13,36
6	2010	6.277.311.305,51	5.576.575.805,51	700.735.500,00	11,16
7	2011	8.491.387.857,22	7.959.777.037,22	531.610.820,00	6,26
8	2012	12.902.654.719,26	11.898.727.629,26	1.003.927.090,00	7,78
9	2013	34.648.432.464,51	21.472.870.968,68	13.175.561.495,83	
10	214	34.634.950.381,48	30.272.705.137,61	4.362.245.243,87	
	<b>J U M L A H</b>	<b>162.409.732.569,22</b>	<b>138.833.139.368,40</b>	<b>23.576.593.200,82</b>	<b>14,52</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGASI, TUJUAN TERTENTU, DAN SANGGAH BANDING  
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMANTANPER ESELON I SAMPAI DENGAN TAHUN 2014**

NO.	ESELON I	KERUGIAN NEGARA (RP)	PENYELESAIAN (RP)	SISA (RP)	%
1	SETJEN	2.786.587.640,73	289.374.110,00	2.497.213.530,73	89,62
2	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.855.715.753,27	3.003.623.784,27	852.091.969,00	22,10
3	DITJEN HOTIKULTURA	690.340.394,00	194.776.500,00	495.563.894,00	71,79
4	DITJEN PERKEBUNAN	849.151.561,40	849.151.561,40	-	-
5	DITJEN PETERNAKAN	2.984.299.620,00	2.243.019.375,00	741.280.245,00	24,84
6	DITJEN PPHP	484.056.634,00	387.810.810,00	96.245.824,00	19,88
7	DITJEN PSP	4.642.737.098,80	889.126.598,80	3.753.610.500,00	80,85
8	BADAN LITBANG	1.172.144.228,00	1.159.497.195,00	12.647.033,00	1,08
9	BADAN SDM	846.887.526,00	846.887.526,00	-	-
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	20.075.000,00	20.075.000,00	-	-
11	BADAN KARANTINA	4.245.533.060,17	4.014.245.867,11	231.287.193,06	5,45
<b>J U M L A H</b>		<b>22.577.528.516,37</b>	<b>13.897.588.327,58</b>	<b>8.679.940.188,79</b>	<b>38,45</b>

**KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGASI, TUJUAN TERTENTU, DAN SANGGAH BANDING  
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMANTANPER ESELON I SAMPAI DENGAN TAHUN 2014**

NO.	TAHUN ANGGARAN	KERUGIAN NEGARA (RP)	PENYELESAIAN (RP)	SISA (RP)	%
1	2005	4.826.225.663,40	4.087.813.368,40	738.412.295,00	15,30
2	2006	1.299.603.562,00	1.270.536.562,00	29.067.000,00	2,24
3	2007	207.091.287,00	181.091.287,00	26.000.000,00	12,55
4	2008	3.460.510.151,80	3.460.510.151,80	-	0,00
5	2009	789.615.635,82	789.615.635,82	-	0,00
6	2010	123.210.824,00	52.965.000,00	70.245.824,00	57,01
7	2011	468.456.650,00	172.756.650,00	295.700.000,00	63,12
8	2012	1.157.996.298,00	829.146.148,00	328.850.150,00	28,40
9	2013	5.609.562.480,73	2.513.071.855,00	3.096.490.625,73	55,20
10	2014	4.635.255.963,62	540.082.269,56	4.095.173.694,06	88,35
	<b>J U M L A H</b>	<b>22.577.528.516,37</b>	<b>13.897.588.927,58</b>	<b>8.679.939.588,79</b>	<b>38,45</b>



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1210/Kpts/OT.140/11/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PREDIKAT SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta untuk mendorong pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, telah dibentuk SATLAK-PI pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dan UPT Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Unit Kerja Eselon I dan UPT Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Oktober s.d 17 November 2014, telah menetapkan beberapa Unit Kerja sebagai Unit Kerja Eselon I dan UPT yang patuh melaksanakan Sistem Pengendalian Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Predikat Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden dengan nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
7. Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Predikat Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014.

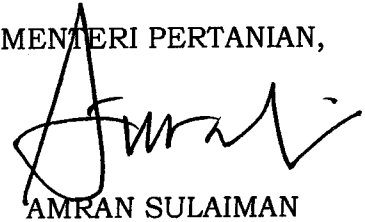
KEDUA : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK-PI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI PERTANIAN,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Unit Kerja Yang bersangkutan.



DAFTAR HASIL PENILAIAN SPI TAHUN 2014					
PENILAIAN TAHUN 2014		KLASIFIKASI			
NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
		< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
1	2	8	9	10	11
<b>Tim Penilai : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian</b>					
1	Sekretariat Jenderal (Satlak PI di Biro Perencanaan)			1	
2	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian		1		
3	Pusat Data dan Informasi Pertanian			1	
4	Pusat Kerjasama Luar Negeri			1	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
5	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			1	
6	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan (BPMPTP) Pasar Minggu Jakarta			1	
7	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih TPH (BBPPMBTPH) Cimanggis				1
8	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari				1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
9	Direktorat Jenderal Hortikultura				1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
10	Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan				1
11	Balai Inseminasi Buatan Lembang				1
12	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH), Gunungsinur				1
13	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi				1
14	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor			1	
15	Balai Embrio Ternak Cipelang				1
16	Pusat Veterinaria Farma Surabaya			1	
17	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang				1
18	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden				1
19	Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta				1
20	Balai Besar Veteriner Denpasar				1
21	Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar				1
22	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri		1		
23	Balai Veteriner Medan			1	

NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KLASIFIKASI			
		KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
		< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
1	2	8	9	10	11
24	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong - Sumut		1		
25	Balai Veteriner Bukit Tinggi-Sumbar			1	
26	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas		1		
27	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak - Sembawa				1
28	Balai Veteriner Banjarbaru Kalsel				1
29	Balai Veteriner Lampung			1	
30	Balai Besar Veteriner Maros Sulsel			1	
31	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Kalsel			1	
32	Balai Veteriner Subang				1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
33	Direktorat Jenderal Perkebunan				1
34	Balai Besar Perbenihan & Proteksi Tanaman Perkebunan Jombang			1	
35	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak - Kalbar			1	
36	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon - Maluku			1	
37	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan - Sumut			1	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
38	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian				1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
39	Direktorat Jenderal PPHP				1
40	Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Citayam		1		
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
41	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			1	
42	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan			1	
43	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura				1
44	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan		1		
45	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan			1	
46	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor			1	
47	Balai Besar Penelitian & Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor			1	
48	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor				1
49	Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi				1

NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KLASIFIKASI			
		KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
		< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
1	2	8	9	10	11
50	Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor				1
51	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong			1	
52	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat			1	
53	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITTRO) Bogor			1	
54	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Bogor				1
55	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Bogor			1	
56	Balai Besar Pengkajian & Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor				1
57	Balai Penelitian Tanah Bogor			1	
58	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (BALITKLIMAT) Bogor			1	
59	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Pakuwon				1
60	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta			1	
61	Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung				1
62	Balai Penelitian Ternak Ciawi			1	
63	Balai Penelitian Sayuran Lembang			1	
64	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian			1	
65	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Serang-Banten				1
66	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung Malang			1	
67	Balai Penelitian Tanaman Pemanis & Serat - Malang			1	
68	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Malang			1	
69	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jatim				1
70	Loka Penelitian Sapi Potong- Grati				1
71	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan Jateng				1
72	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran Jateng			1	
73	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DIY			1	
74	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Denpasar			1	
75	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB				1
76	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD		1		
77	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumut				1
78	Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih - Sumut				1
79	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok			1	
80	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumbar			1	
81	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung			1	
82	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau			1	
83	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian - Tanjung Pinang Kepri.			1	
84	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalsel			1	
85	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulsel			1	
86	Balai Penelitian Tanaman Sereal Maros Sulsel			1	
87	Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang			1	
88	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulut			1	
89	Balai Penelitian Tanaman Palma Sulut			1	

NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KLASIFIKASI			
		KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
		< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
1	2	8	9	10	11
90	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulteng		1		
91	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalbar			1	
92	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalteng				1
93	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim				1
94	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru Kalsel				1
95	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi				1
96	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT			1	
97	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku			1	
98	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	1			
99	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo			1	
100	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel			1	
101	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sultra			1	
102	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian - Sulbar			1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>19</b>
103	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian				1
104	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi			1	
105	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara				1
106	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor		1		
107	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang			1	
108	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang				1
109	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang			1	
110	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang				1
111	STPP Magelang				
	- Jurusan Penyuluhan Peternakan				1
	- Jurusan Penyuluhan Pertanian				1
112	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan			1	
113	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa		1		
114	Balai Pelatihan Pertanian Jambi			1	
115	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Sulsel			1	
116	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa			1	
117	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Kalsel		1		
118	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru Kalsel			1	
119	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang				1
120	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang - NTT			1	
121	Balai Pelatihan Pertanian Lampung				1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
122	Badan Ketahanan Pangan			1	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KLASIFIKASI			
		KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
		< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
1	2	8	9	10	11
123	Badan Karantina Pertanian				1
124	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta			1	
125	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon		1		
126	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok			1	
127	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian			1	
128	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung			1	
129	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta				1
130	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak			1	
131	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang			1	
132	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam			1	
133	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru			1	
134	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun				1
135	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar				1
136	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo			1	
137	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap			1	
138	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju Sulbar		1		
139	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate				
140	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon-Maluku				1
141	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado			1	
142	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda			1	
143	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Kalimantan Utara				1
144	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Kaltim				1
145	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram				1
146	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar NTB		1		
147	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare Sulsel				1
148	Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel-Makasar			1	
149	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang				1
150	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang				1
151	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Kalsel				1
152	Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung				1
153	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu		1		
154	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi				1
155	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang - NTT		1		
156	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende -NTT			1	
157	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya			1	
158	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan			1	
159	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh			1	
160	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong			1	
161	Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang			1	
162	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan			1	

NO	UNIT KERJA/SATLAK PI	KLASIFIKASI			
		KURANG HANDAL	CUKUP HANDAL	HANDAL	SANGAT HANDAL
1	2	< 55	55 - 70	71 - 85	> 85
		8	9	10	11
163	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan		1		
164	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan				1
165	Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari-Sultra			1	
166	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Kalteng				1
167	Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Bekasi			1	
	Jumlah	0	6	22	16
	Jumlah Total	1	17	87	62



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1211/Kpts/OT.140/11/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT KERJA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan percepatan pemberantasan korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Wilayah Bebas Dari Korupsi pada Unit Kerja Lingkup Kementerian pada tanggal 22 Oktober s.d 18 November 2014, perlu memberikan penghargaan kepada Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan Percepatan Pemberantasan Korupsi melalui Program Wilayah Bebas Dari Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden dengan nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3898/Kpts/OT. 160/12/2010 tentang Tim Rencana Aksi Instansi Pemberantasan Korupsi (RAI-PK) di Lingkungan Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

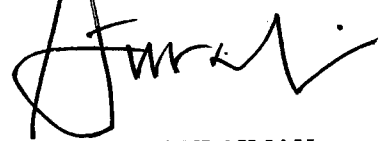
KESATU : Menetapkan Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Tahun 2014.



- KEDUA : Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Unit Kerja Pembantu Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Unit Kerja Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1211/Kpts/OT.140/11/2014

TANGGAL : 28 Nopember 2014

UNIT KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SEBAGAI UNIT KERJA  
BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK)

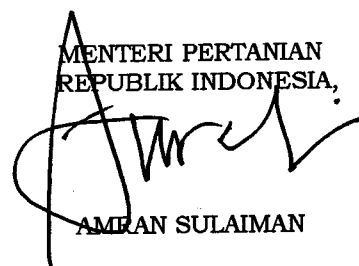
NO.	ESELON II	KETERANGAN
1	2	3
<b>Sekretariat Jenderal</b>		
1	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Unit Kerja Eselon II
2	Biro Keuangan dan Perlengkapan	Unit Kerja Eselon II
3	Biro Hukum dan Informasi Publik	Unit Kerja Eselon II
4	Biro Umum dan Humas	Unit Kerja Eselon II
5	Biro Perencanaan	Unit Kerja Eselon II
6	Pusat Kerjasama Luar Negeri	Unit Kerja Eselon II
7	Pusat Data dan Informasi Pertanian	Unit Kerja Eselon II
8	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian	Unit Kerja Eselon II
<b>Inspektorat Jenderal</b>		
9	Sekretariat Itjen	Unit Kerja Eselon II
10	Inspektorat I	Unit Kerja Eselon II
11	Inspektorat II	Unit Kerja Eselon II
12	Inspektorat III	Unit Kerja Eselon II
13	Inspektorat IV	Unit Kerja Eselon II
14	Inspektorat Investigasi	Unit Kerja Eselon II
<b>Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</b>		
15	Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan	Unit Kerja Eselon II
16	Direktorat Pasca Panen	Unit Kerja Eselon II
17	Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Unit Kerja Eselon II
18	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	Unit Pelaksana
19	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Cimanggis	Unit Pelaksana
20	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Jatisari	Unit Pelaksana
<b>Direktorat Jenderal Hortikultura</b>		
21	Sekretariat Ditjen Hortikultura	Unit Kerja Eselon II
22	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Unit Kerja Eselon II
23	Direktorat Budidaya & Pasca Panen Buah	Unit Kerja Eselon II
24	Direktorat Budidaya Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat	Unit Kerja Eselon II
25	Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Florikultura	Unit Kerja Eselon II
26	Direktorat Perlindungan Hortikultura	Unit Kerja Eselon II
<b>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>		
27	Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit Kerja Eselon II
28	Direktorat Kesehatan Hewan	Unit Kerja Eselon II
29	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Unit Pelaksana
30	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur Bogor	Unit Pelaksana
31	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	Unit Pelaksana
32	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Unit Pelaksana
33	Balai Embrio Ternak Cipelang	Unit Pelaksana
34	Pusat Veteriner Farma Surabaya	Unit Pelaksana
35	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Unit Pelaksana
36	Balai Besar Veteriner Wates	Unit Pelaksana
37	Balai Besar Veteriner Denpasar	Unit Pelaksana
38	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Unit Pelaksana
39	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	Unit Pelaksana
40	Balai Veteriner Baso Bukit Tinggi	Unit Pelaksana
41	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	Unit Pelaksana
42	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Unit Pelaksana
43	Balai Veteriner Banjarbaru	Unit Pelaksana

44	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden	Unit Pelaksana
45	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari, Kalsel	Unit Pelaksana
46	Balai Veteriner Subang	Unit Pelaksana
<b>Direktorat Jenderal Perkebunan</b>		
47	Sekretariat Ditjen Perkebunan	Unit Kerja Eselon II
48	Direktorat Tanaman Tahunan	Unit Kerja Eselon II
49	Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar	Unit Kerja Eselon II
50	Direktorat Tanaman Semusim	Unit Kerja Eselon II
51	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Jombang	Unit Pelaksana
52	BB Perbenihan dan Proteksi Tan. Perkebunan Medan	Unit Pelaksana
53	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	Unit Pelaksana
54	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tan. Perkebunan Ambon	Unit Pelaksana
<b>Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</b>		
55	Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Unit Kerja Eselon II
56	Direktorat pembiayaan	Unit Kerja Eselon II
57	Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Unit Kerja Eselon II
58	Direktorat Pupuk dan Pestisida	Unit Kerja Eselon II
59	Direktorat Pengelolaan Air Irigasi	Unit Kerja Eselon II
<b>Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</b>		
60	Sekretariat Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Unit Kerja Eselon II
61	Direktur Pengolahan Hasil Pertanian	Unit Kerja Eselon II
62	Direktorat Pemasaran Internasional	Unit Kerja Eselon II
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</b>		
63	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	Unit Pelaksana
64	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor	Unit Kerja Eselon II
65	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi	Unit Pelaksana
66	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Malang	Unit Pelaksana
67	Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros	Unit Pelaksana
68	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Jakarta	Unit Kerja Eselon II
69	Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang	Unit Pelaksana
70	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	Unit Pelaksana
71	Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung	Unit Pelaksana
72	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor	Unit Kerja Eselon II
73	Balai Penelitian Ternak Ciawi	Unit Pelaksana
74	Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor	Unit Pelaksana
75	Loka Penelitian Kambing Potong Sungei Putih	Unit Pelaksana
76	Loka Penelitian Sapi Potong Grati	Unit Pelaksana
77	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor	Unit Kerja Eselon II
78	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bogor	Unit Pelaksana
79	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang	Unit Pelaksana
80	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Pakuwon	Unit Pelaksana
81	Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, Bogor	Unit Pelaksana
82	Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Unit Pelaksana
83	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor	Unit Pelaksana
84	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan	Unit Pelaksana
85	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bogor	Unit Kerja Eselon II
86	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor	Unit Kerja Eselon II
87	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor	Unit Pelaksana
88	Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor	Unit Pelaksana
89	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	Unit Pelaksana
90	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten	Unit Pelaksana
91	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Unit Pelaksana
92	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	Unit Pelaksana
93	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	Unit Pelaksana
94	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD	Unit Pelaksana
95	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	Unit Pelaksana
96	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	Unit Pelaksana
97	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu	Unit Pelaksana
98	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	Unit Pelaksana
99	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau	Unit Pelaksana
100	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	Unit Pelaksana

101	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Unit Pelaksana
102	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	Unit Pelaksana
103	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	Unit Pelaksana
104	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat	Unit Pelaksana
105	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan	Unit Pelaksana
106	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	Unit Pelaksana
107	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	Unit Pelaksana
108	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	Unit Pelaksana
109	Balai Penelitian Tanah Bogor	Unit Pelaksana
110	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	Unit Pelaksana
111	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB	Unit Pelaksana
112	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT	Unit Pelaksana
113	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	Unit Pelaksana
114	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	Unit Pelaksana
<b>Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian</b>		
115	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Unit Kerja Eselon II
116	Pusat Pelatihan Pertanian	Unit Kerja Eselon II
117	Pusat Penyuluhan Pertanian	Unit Kerja Eselon II
118	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi	Unit Pelaksana
119	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	Unit Pelaksana
120	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Unit Pelaksana
121	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	Unit Pelaksana
122	Balai Besar Pelatihan Ketindan, Malang-Jatim	Unit Pelaksana
123	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Unit Pelaksana
124	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	Unit Pelaksana
125	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	Unit Pelaksana
126	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Unit Pelaksana
127	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	Unit Pelaksana
128	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	Unit Pelaksana
129	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	Unit Pelaksana
130	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	Unit Pelaksana
131	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	Unit Pelaksana
132	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang- Kalsel	Unit Pelaksana
133	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	Unit Pelaksana
134	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang NTT	Unit Pelaksana
<b>Badan Ketahanan Pangan</b>		
135	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	Unit Kerja Eselon II
136	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Unit Kerja Eselon II
137	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	Unit Kerja Eselon II
<b>Badan Karantina Pertanian</b>		
138	Sekretariat Badan Karantina Pertanian	Unit Kerja Eselon II
139	Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan	Unit Kerja Eselon II
140	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Unit Kerja Eselon II
141	Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Unit Kerja Eselon II
142	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	Unit Pelaksana
143	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta	Unit Pelaksana
144	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta	Unit Pelaksana
145	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	Unit Pelaksana
146	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Unit Pelaksana
147	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Unit Pelaksana
148	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Unit Pelaksana
149	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Unit Pelaksana
150	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Unit Pelaksana
151	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Unit Pelaksana
152	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Unit Pelaksana
153	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	Unit Pelaksana
154	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	Unit Pelaksana
155	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Aceh	Unit Pelaksana
156	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Unit Pelaksana
157	Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	Unit Pelaksana
158	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	Unit Pelaksana
159	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	Unit Pelaksana
160	Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung	Unit Pelaksana
161	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	Unit Pelaksana

162	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	Unit Pelaksana
163	Balai Besar Karantina Pertanian Makasar	Unit Pelaksana
164	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-pare	Unit Pelaksana
165	Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	Unit Pelaksana
166	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Unit Pelaksana
167	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	Unit Pelaksana
168	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	Unit Pelaksana
169	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	Unit Pelaksana
170	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	Unit Pelaksana
171	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	Unit Pelaksana
172	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	Unit Pelaksana
173	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Unit Pelaksana
174	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende NTT	Unit Pelaksana
175	Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	Unit Pelaksana
176	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	Unit Pelaksana
177	Balaia Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Unit Pelaksana
178	Stasiun Karantina Pertaanian Kelas I Ambon	Unit Pelaksana
179	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	Unit Pelaksana
180	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	Unit Pelaksana
181	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	Unit Pelaksana
182	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	Unit Pelaksana
183	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	Unit Pelaksana
184	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	Unit Pelaksana
185	Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Bekasi	Unit Pelaksana

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN